



LAPORAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE AGUSTUS 2020 S/D FEBRUARI 2024



Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

KATA PENGANTAR



Puji Syukur Kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan Rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pembangunan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2024 sebagai Memory Akhir Jabatan (MAJ) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tepat pada waktunya. Laporan ini menyajikan data dan informasi tentang pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu disajikan juga segala bentuk kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (renstra) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Memori ini merupakan salah satu media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2024. Memori ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sebagai media informasi bagi pemangku jabatan yang baru dengan harapan pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan peralihan pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan tepat dan akurat. Harapannya pemangku jabatan yang baru dapat memetakan langkah-langkah pembangunan pertanian melalui perluasan areal tanam (ekstensifikasi), serta peningkatan produksi persatuan luas lahan melalui sentuhan teknologi produksi (intensifikasi).

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di NTT penyumbang PDRB dan pelaksana mandat sebagai penyedia pangan bagi Masyarakat. Selain sebagai penghasil bahan pangan dimana ketahanan pangan merupakan prasyarat utama bagi tercapainya ketahanan ekonomi maupun ketahanan sosial, sektor pertanian juga merupakan sektor penting yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Masyarakat NTT melalui peningkatan kualitas hidup Masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan nasional dan sebagai komoditas ekspor yang berperan sebagai penyumbang devisa.

Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan limpah terima kasih untuk setiap kontribusi yang telah diberikan yakni tenaga maupun pikiran demi tercapainya tujuan "Jaga Pangan Jaga Masa Depan". Semoga pertanian di NTT terus berkembang dalam peningkatan produksi dan produktivitas baik Tanaman Pangan, Perkebunan maupun Hortikultura.

Kupang, 29 Februari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur,




LECKY FREDERICH KOLI, S.TP
Pembina Utama Madya
NIP 196402101986031029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
SUBSTANSI SUMBER DAYA MANUSIA & SARANA PRASARANA	4
1. SUMBER DAYA MANUSIA	4
2. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG	43
SUBSTANSI INOVASI, PENGHARGAAN & KERJASAMA	48
1. INOVASI	48
2. PENGHARGAAN	56
SUBSTANSI KERJASAMA / KEMITRAAN & KUNJUNGAN	64
1. KERJASAMA / KEMITRAAN	64
2. KUNJUNGAN	67
SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI	71
1. PROGRAM	72
2. DATA	76
3. EVALUASI	93
PENUTUP	112

SUBSTANSI SUMBER DAYA MANUSIA & SARANA PRASARANA

1. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan tugas operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ditunjang oleh sumber daya aparatur sipil negara (ASN) dan non ASN. Jumlah ASN dan non ASN yaitu 352 orang untuk ASN (Pegawai Negeri Sipil) dan 331 orang untuk non ASN yang terdiri dari Pejabat Eselon/Struktural, Non Eselon, Tenaga Fungsional, PPPK serta Tenaga Honorer (non ASN). Berikut gambaran tentang sumber daya aparatur sipil negara (ASN) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Orang
		L	P	
1	S2	10	7	17
2	S1 Teknis	97	82	179
3	S1 Non Teknis	12	14	26
4	D3 Teknis	9	6	15
5	D3 Non Teknis	4	4	8
6	SMA Teknis	18	5	41
7	SMA Non Teknis	40	14	55
8	SMP	4	0	4
9	SD	7	0	7
Jumlah		201	132	333
PPPK				
1	S1	-	2	
2	SMA Teknis	14	3	
		14	5	
Jumlah		215	137	352

Sumber data: Kepegawaian Desember 2023

Sumber daya ASN Pangkat golongan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas golongan IV (empat), golongan III (tiga), golongan II (dua), golongan I (satu), golongan IX (sembilan) dan golongan V (lima).

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan pangkat dan golongan.

No	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
1	Pembina Utama (IV/e)	-	-	-
2	Pembina Utama Madya (IV/d)	-	-	-
3	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
4	Pembina Tingkat I (IV/b)	2	3	5
5	Pemibina (IV/a)	11	6	17
6	Penata Tingkat I (III/d)	41	54	95
7	Penata (III/c)	31	27	58
8	Penata Muda Tingkat I (III/b)	40	19	59
9	Penata Muda (III/a)	33	14	47
10	Pengatur Tingkat I (II/d)	20	6	26
11	Pengatur (II/c)	8	3	11
12	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	7	-	7
13	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
14	Juru Tingkat I (I/d)	4	-	4
15	Juru (I/c)	1	-	1
16	Juru Muda Tingkat I (I/b)	1	-	1
17	Juru Muda (I/a)	-	-	-
18	PPPK (IX)	-	2	2
19	PPPK (V)	14	3	17
Jumlah		215	137	352
Jumlah golongan IV		14	9	23
Jumlah golongan III		145	114	260

No	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenis Kelamin		Jumlah (Orang)
		L	P	
		Jumlah golongan II	36	
Jumlah golongan I	6	-	6	
Jumlah golongan IX	-	2	2	
Jumlah golongan V	14	3	17	
Jumlah		215	137	352

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

Tenaga Fungsional pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Perencana, Pengawas Benih Tanaman (PBT), Analis Pasar Hasil Pertanian, Analis Keuangan Pusat/Daerah, Pengawas Alat dan Mesin Pertanian, Analis Ketahanan Pangan, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Pranata Komputer.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berdasarkan tugas fungsional.

No.	Fungsional	Jumlah Orang
1	Penyuluh Pertanian	8
2	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	4
3	Perencana	1
4	Pengawas Benih Tanaman	9
5	Analis Pasar Hasil Pertanian	3
6	Analis Keuangan Pusat/Daerah	1
7	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	5
8	Analis Ketahanan Pangan	1
9	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	6
10	Pranata Komputer	1
Jumlah		38

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

Tenaga Kontrak Non ASN pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri atas Tenaga Kontrak Reguler, Petugas Lapangan TJPS dan Operator Traktor.

Tabel 1.4 Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No.	Kontrak	Jumlah Orang
1	Reguler	152
2	TJPS	120
3	Operator Traktor	43
Jumlah		315

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjabarkan bahwa Sub Bagian Kepegawaian dan Umum merumuskan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Dalam urusan kepegawaian, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum melakukan aktifitas antara lain :

1) Urusan Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat terbagi atas kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat fungsional, kenaikan pangkat struktural dan kenaikan pangkat penyesuaian iajzah. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pasal 2, ditetapkan sebanyak 6 (enam) periode dalam satu tahun anggaran yaitu : 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember, yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2024.

Data Kenaikan Pangkat PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada tahun 2023:

Tabel 1.5 Tabel data Kenaikan Pangkat PNS 2023

NO	PERIODE	GOLONGAN											JUMLAH	
		IV		III					II				GOL.	
		a	Σ	a	b	c	d	Σ	a	b	c	d	Σ	(IV s/d II)
1	APRIL	4	4	24	9	15	18	66	1	1	2	1	5	75
2	OKTOBER	1	1		1	6		7				3	3	11
	JUMLAH	5	5	24	10	21	18	73	1	1	2	4	8	86

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

2) Urusan Pensiun, Mutasi dan Cuti Pegawai

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 90 bahwa PNS dapat diberhentikan jika telah mencapai batas usia pensiun dengan kriteria :

- a) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi
- b) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
- c) Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional.

Tabel Data 1.6 Pensiun PNS Tahun 2023

No.	Bulan	Keterangan		
		Pensiun Dini	Mencapai BUP	Meninggal Dunia
1.	Januari	-	4 Orang	1 Orang
2.	Februari	-	2 Orang	-
3.	Maret	-	-	-
4.	April	-	1 Orang	1 Orang
5.	Mei	-	1 Orang	1 Orang
6.	Juni	-	-	-
7.	Juli	-	2 Orang	-
8.	Agustus	-	2 Orang	-
9.	September	-	-	2 Orang
10.	Oktober	-	2 Orang	-
11.	November	-	2 Orang	2 Orang
12.	Desember	-	3 Orang	-
	Total		18 Orang	7 Orang

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

Selain pensiun, terdapat juga mutasi keluar dan masuk pegawai pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi di tahun 2023, yaitu:

a) Mutasi Masuk

Tabel 1.7 Data Mutasi Masuk 2023

No.	Bulan	Mutasi Masuk	OPD Sebelumnya	Ket.
1.	Februari	1 Orang	Dinas Peternakan Prov. NTT	Kabid Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
2.	Maret	1 Orang	Dinas Peternakan Prov. NTT	Staf UPTD Perbenihan TPH
3.	September	2 Orang	1. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kab Nagekeo 2. UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kab Sumba Timur	1. Kepala Bidang Perkebunan 2. Kepala Tata Usaha UPTD Proteksi TPHP
	Jumlah	4 Orang		

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

b) Mutasi Keluar

Tabel 1.8 Data Mutasi Keluar 2023

No.	Bulan	Mutasi Keluar	OPD Tujuan	Ket.
1.	Februari	1 Orang	BPS Kab. Mojokerto	Staf
2.	Juni	2 Orang	1. UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. NTT 2. UPTD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Kepala Tata Usaha (KTU) Kepala Tata Usaha (KTU)
	Jumlah	3 Orang		

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

Sementara itu jumlah ASN yang mengambil cuti selama tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 1.9 Data Cuti ASN 2023

No.	Bulan	Cuti Tahunan	Cuti Besar	Cuti Sakit	Cuti Melahirkan	Cuti Alasan Penting	Cuti Di Luar Tanggungan Negara
1.	Januari	3			1		
2.	Februari	3		1		2	
3.	Maret			2		1	
4.	April			3	1		
5.	Mei	3	1		1		
6.	Juni	13		2		1	
7.	Juli	6	1	2	1	2	
8.	Agustus	12		1	1	1	
9.	September	6		3			
10.	Oktober	9		1		1	
11.	November	4		1		2	
12.	Desember	-	-	-	-	-	
	TOTAL	59	2	16	5	10	

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

3) Urusan Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala adalah hak PNS yang telah menjalani masa kerja 2 (dua) tahun. KGB merupakan bentuk penghargaan negara dalam hal peningkatan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Untuk Golongan I dan II diberikan pada saat masa kerja Ganjil (kecuali untuk Golongan Ruang I/a) sedangkan untuk Golongan I/a, III dan IV pada saat masa kerja Genap.

Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang PNS yang diangkat dalam golongan I, II, III, dan IV diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali.

Tabel 1.10 Data Kenaikan Gaji Berkala

NO	BULAN	GOLONGAN														JUMLAH GOL. (IV s/d I)	
		IV			III					II					I		
		a	b	Σ	a	b	c	d	Σ	a	b	c	d	Σ	d		Σ
1	JANUARI	2	1	3	5	13	29	9	56		3	1	8	12	1	1	72
2	FEBRUARI			-		5	1	2	8					-		-	8
3	MARET	4		4	4	4	2	8	18				1	1	1	1	24
4	APRIL		1	1	1	14	3	9	27	1		1	1	3		-	31
5	MEI			-	2	2	2	3	9					-	1	1	10
6	JUNI			-	4				4				1	1		-	5
7	JULI			-		1			1					-		-	1
8	AGUSTUS		1	1					-					-		-	1
9	SEPTEMBER			-	1	1			2					-		-	2
10	OKTOBER			-				2	2					-		-	2
11	NOVEMBER			-	1				1					-		-	1
12	DESEMBER	2		2		1			1					-		-	3
	TOTAL	8	3	11	18	41	37	33	129	1	3	2	11	17	3	3	160

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

4) Penyusunan Model C

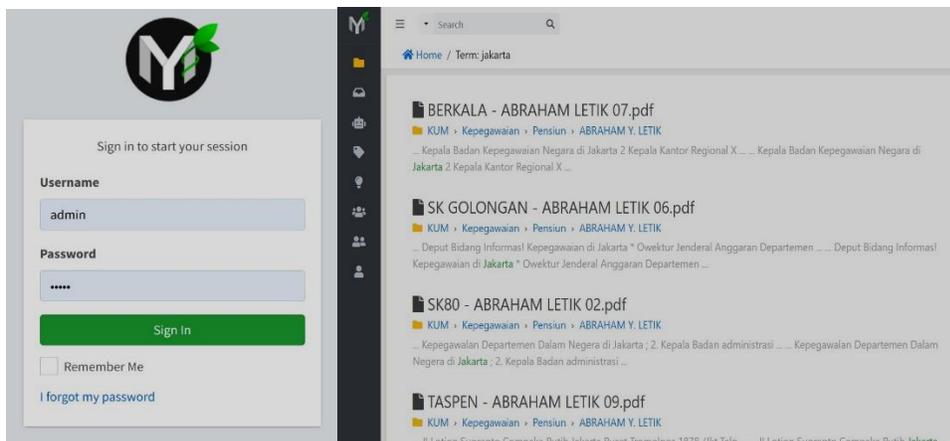
Model C adalah surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga bagi pegawai negeri sipil. Tunjangan keluarga meliputi tunjangan suami/istri, tunjangan anak, dan tunjangan beras. Model C PNS harus diisi dan diserahkan oleh PNS yang mengalami perubahan status keluarga, seperti menikah, bercerai, memiliki anak, atau naik golongan. Model C PNS juga harus diperbarui setiap tahunnya.

5) Digitalisasi Dokumen Kepegawaian

Digitalisasi dokumen kepegawaian adalah salah satu cara proses mengubah dokumen/arsip konvensional ke dalam berbagai bentuk dan media menjadi dokumen/arsip elektronik/ digital. Digitalisasi membantu meningkatkan dan

mengubah operasi bisnis melalui data digital. Hal ini dapat tercapai dengan memanfaatkan teknologi cerdas untuk mengubah dan memahami data dengan lebih baik, mempermudah pencarian dokumen, ruang penyimpanan tidak terbatas, resiko kehilangan dokumen dapat dihindari, keamanan dokumen terjamin dan penghematan anggaran. Digitasi dokumen kepegawaian dilakukan melalui aplikasi "Digitasi Kepegawaian Terpadu (DIPADU)".

Gambar 1.1 Tampilan Aplikasi "Digitasi Kepegawaian Terpadu (DIPADU)



Sumber data : Kepegawaian 2023

6) Penyusunan Data Urutan Kepegawaian (DUK)

Daftar Urut Kepangkatan (DUK) PNS dibuat berdasarkan landasan hukum: 1) Pasal 18 ayat 5 dan pasal 20 UPK 1974; 2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil. Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai negeri sipil adalah suatu daftar yang di dalamnya memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi Negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan, yang berdasarkan: pangkat, jabatan, masa kerja, latihan jabatan, pendidikan dan usia.

- 7) Pengusulan Kartu Pegawai (karpeg) dan Kartu Istri/Suami (karis/karsu), BPJS, Taspen dan Bapertarum
- a) Karpeg adalah Kartu Identitas yang dibagikan untuk mereka yang sudah menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Diberikan kepada pegawai pusat dan pegawai daerah. Total PNS di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang belum memiliki Karpeg sebanyak 18 orang, terdiri dari PNS TMT 2020: 3 orang dan 2022: 15 orang.
 - b) Kartu suami (KARSU) adalah kartu identitas bagi suami yang beristrikan PNS dan sebaliknya Kartu Istri (KARIS) adalah kartu identitas bagi istri yang bersuamikan PNS.
 - c) BPJS Kesehatan adalah kartu identitas yang dibagikan untuk mereka yang sudah menyandang status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Diberikan kepada pegawai pusat dan pegawai daerah. Seluruh PNS dan tenaga kontrak pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan.
 - d) Taspen akan memberikan pertanggungjanaan pada setiap ASN sesuai dengan kesepakatan polis, baik itu untuk jaminan pensiun, asuransi kesehatan, dan jaminan lainnya. Pada dasarnya, semua pekerja membutuhkan suatu jaminan pensiun di hari tua sebagaimana pada masa-masa itu dirinya sudah tidak sekuat atau seproduktif sebelumnya. Seluruh PNS dan PPPK pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah terdaftar keanggotaannya di PT. Taspen.
 - e) Bapertarum adalah singkatan dari Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil. Ini adalah fasilitas yang berupa pinjaman lunak yang diberikan oleh pemerintah kepada PNS, termasuk pensiunan, yang bermimpi memiliki rumah. Dengan suku bunga rendah dan jangka waktu pembayaran yang panjang, Bapertarum bisa jadi solusi yang sangat membantu untuk bapak-ibu yang ingin memiliki rumah sendiri. Seluruh PNS pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT terdaftar sebagai penerima Bapertarum namun

tidak semuanya menggunakan fasilitas ini.

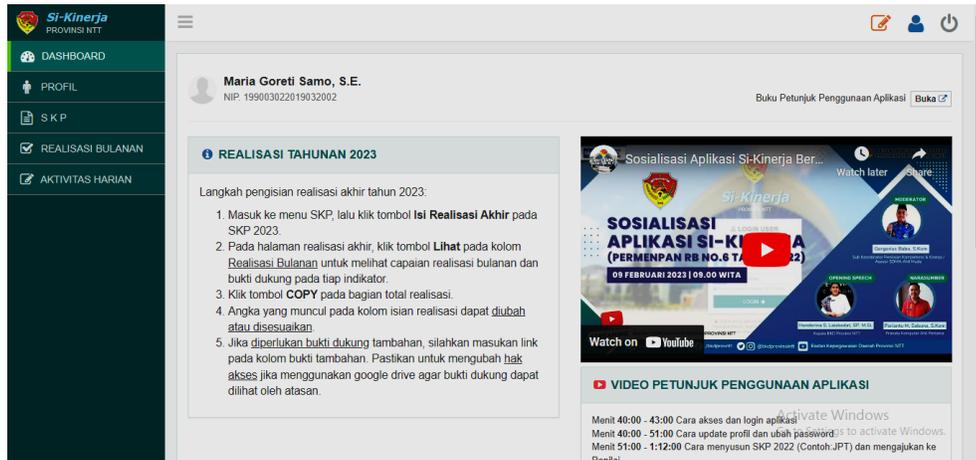
- 8) Penyiapan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural.

Setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan mengangkat sumpah/janji Jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelantikan dan pengangkatan sumpah/janji Jabatan dapat dilakukan terhadap PNS yang mengalami kenaikan jenjang Jabatan fungsional. Penyiapan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan dilakukan agar proses sumpah dapat dilakukan sesuai dengan prosedur dan kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi. Seluruh PNS Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah mengikuti sumpah PNS.

- 9) Penyiapan administrasi penetapan angka kredit pejabat fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

Menurut Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, Angka kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja pejabat fungsional. Nilai ini kemudian dilaporkan dalam laporan penetapan angka kredit. Penetapan angka kredit merupakan hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit yang harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Pelaporan SKP dilakukan dengan mengisi kegiatan harian pada aplikasi Si-Kinerja yang dapat diakses melalui link <http://ekinerja.bkd.nttprov.go.id/> seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 1.2 Tampilan Aplikasi Si Kinerja



Sumber data : Kepegawaian 2023

10) Penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai baik diklat struktural, teknis maupun fungsional.

11) Pengolahan data pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup dinas sesuai dengan rencana kerja pokja area perubahan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business proses) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki karakteristik yaitu: Adaptif, Berintegritas, Berkinerja tinggi, Bersih dan bebas KKN, Mampu melayani publik, Netral, Sejahtera, Berdedikasi dan Memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Upaya tersebut sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi Nasional, yang tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Lebih lanjut, ada tiga poin utama yang menjadi fokus Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri, yaitu:

1. Menerapkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan mengembangkan atau menyempurnakan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperjuangkan kepentingan nasional di forum internasional dan melindungi WNI dan Badan Hukum Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan memastikan bahwa seluruh unit kerja baik di Perwakilan Pusat maupun di Luar Negeri telah menerapkan sistem administrasi dan manajemen yang menjunjung tinggi seluruh prinsip organisasi.

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Gambar 1.3 Standar Pelayanan Informasi Publik



Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

Dalam tujuannya untuk peningkatan pelayanan publik, reformasi birokrasi kemudian berkembang dalam penanganan pengaduan maupun survey kepuasan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pertanian. Peningkatan pelayanan Publik dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Pelayanan Pengaduan Masyarakat; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Zona Integritas.

a. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Survey kepuasan masyarakat dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun sebagai evaluasi guna peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. SKM yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survey yang ditentukan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga melakukan survey kepuasan masyarakat melalui barcode yang disediakan pada meja pelayanan, sehingga tamu

diarahkan untuk melakukan scan barcode dan mengisi survey yang ada secara online melalui handphone.

Gambar 1.4 Barcode Survey Kepuasan Masyarakat



Sumber data : Kepegawaian 2023

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara periodik menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Nilai yang diperoleh dari hasil analisis permasalahan/kelemahan dan kelebihan unsur-unsur Layanan yang dilakukan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT:

1. Persyaratan : 82,94
2. Prosedur : 83,14

3. Jangka waktu : 82,06
4. Tarif : 82,35
5. Produk : 83,92
6. Kompetensi : 83,82
7. Perilaku : 84,12
8. Sarana : 83,53
9. Pengaduan : 81,86

Dari ke-9 unsur yang dinilai diatas dihitung rata-rata nilai IKM yaitu 83,08 dengan kategori penilaian B (baik).

b. Pengaduan Masyarakat

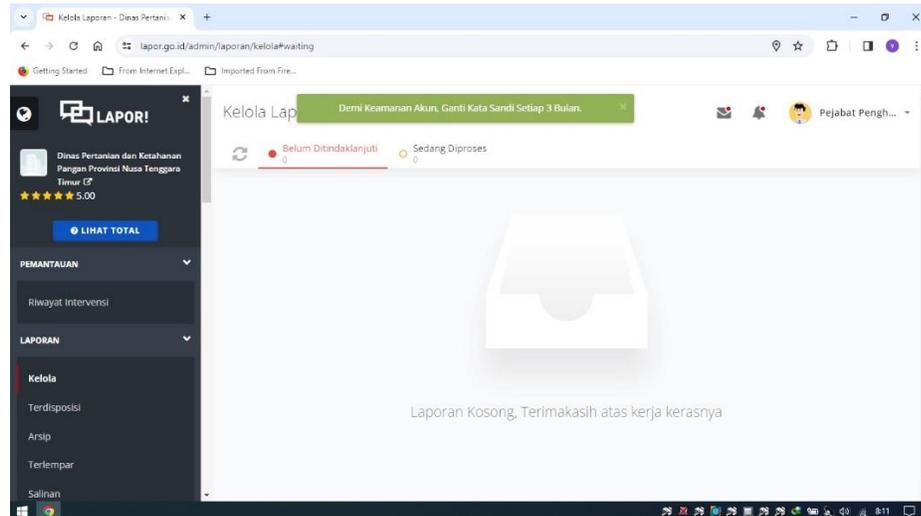
Pengelolaan pengaduan pelayanan publik di setiap organisasi penyelenggara di Indonesia belum terkelola secara efektif dan terintegrasi. Masing-masing organisasi penyelenggara mengelola pengaduan secara parsial dan tidak terkoordinir dengan baik. Akibatnya terjadi duplikasi penanganan pengaduan, atau bahkan bisa terjadi suatu pengaduan tidak ditangani oleh satupun organisasi penyelenggara, dengan alasan pengaduan bukan kewenangannya. Oleh karena itu, untuk mencapai visi dalam good governance maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara Nasional. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia membentuk Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) adalah layanan penyampaian semua aspirasi dan pengaduan masyarakat Indonesia melalui beberapa kanal pengaduan yaitu website www.lapor.go.id.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga membuka layanan pengaduan yang dapat dilakukan secara online yang bertujuan untuk evaluasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan kinerja di bidang pertanian. Berikut adalah laman

= Laporan Pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Provinsi NTT | 20
Periode Agustus 2020 s/d Februari 2024 =

pengelolaan laporan pengaduan pelayanan publik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1.5 Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!)



Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah: "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan."

Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah. Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Pengendalian dilaksanakan untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pelayanan publik telah diikuti dan dipatuhi oleh seluruh personil untuk mengantisipasi terjadinya penyimpang antara lain.

1. Kegiatan Apel Pagi/Sore

Gambar 1.6 Kegiatan Apel Pagi dan Sore di Halaman Kantor Dinas



Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

2. Penerimaan tamu melalui duta pelayanan

Gambar 1.7 Petugas Duta Pelayanan



Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

3. Pelayanan Beras untuk PNS

Gambar 1.8 Pengambilan Beras di Badan Urusan Logistik (BULOG)



Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh karena itu, yang menjadi fondasi dari pengendalian adalah orang-orang (SDM) di dalam organisasi yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah. Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.

Dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dan nilai etika organisasi dengan maksud agar seluruh pegawai mengetahui aturan untuk berintegritas yang baik dan melaksanakan kegiatannya dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang berlaku untuk seluruh pegawai tanpa terkecuali. Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Oleh karena itu, budaya kerja yang baik pada instansi pemerintah perlu dilaksanakan secara terus menerus tanpa henti.

Selanjutnya, dibuat pernyataan bersama untuk melaksanakan integritas dan nilai etika tersebut dengan menuangkannya pada suatu pernyataan komitmen untuk melaksanakan integritas. Pernyataan ini berupa pakta (pernyataan tertulis) tentang integritas yang berisikan komitmen untuk melaksanakannya. Selain itu, kompetensi yang merupakan kewajiban pegawai di bidangnya masing-masing. Komitmen yang dilaksanakan secara periodik tersebut perlu dipantau dan dalam pelaksanaannya perlu diimbangi dengan adanya kepemimpinan yang kondusif sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai. Agar dapat mendorong

terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggung jawab kepada pegawai dengan tepat. Terhadap struktur yang telah ditetapkan, perlu dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat. Diperlukan pembinaan sumber daya manusia yang tepat sehingga tujuan organisasi tercapai. Disamping itu, keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) perlu ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara efektif. Hal lainnya yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan kerja sama yang baik diantara instansi pemerintah yang terkait.

Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana disebutkan di atas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif diartikan sebagai situasi dimana pemimpin selalu mengambil keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian risiko. Berdasarkan kepemimpinan yang kondusif inilah, maka muncul kewajiban bagi pimpinan untuk menyelenggarakan penilaian risiko di instansinya. Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah dengan tujuan sasaran, serta kesesuaian dengan tujuan strategis yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi risiko (sub unsur 2.1) atas risiko intern dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, kemudian menganalisis risiko (sub unsur 2.2) yang memiliki probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi sampai dengan risiko yang sangat rendah.

d. Pembangunan Zona Integritas

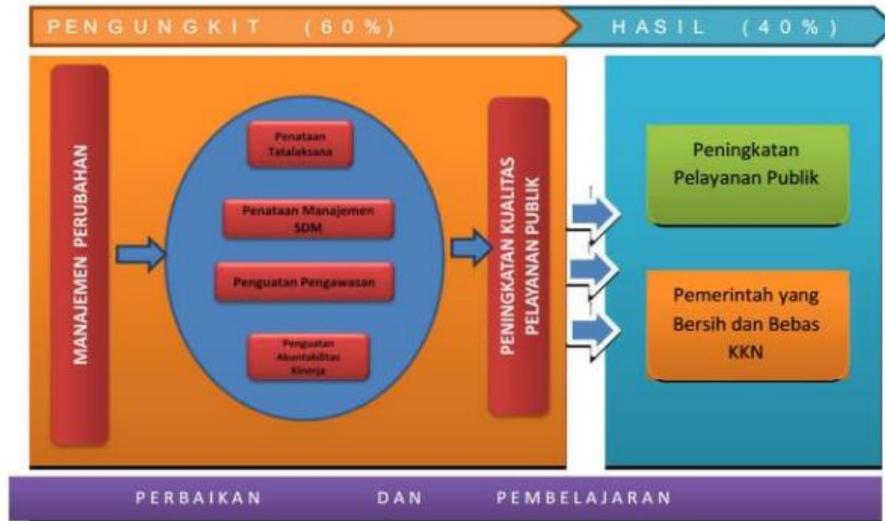
Zona Integritas (ZI) di lingkungan instansi pemerintah adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut penancangan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam penetapan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ditentukan dengan 2 komponen yang harus dibangun yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit meliputi 6 program bidang yaitu:

- 1) Manajemen Perubahan
- 2) Penataan Tatalaksana
- 3) Penataan Manajemen SDM,
- 4) Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- 5) Penguatan Pengawasan,
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Gambar 1.9 Komponen Pengungkit dan Hasil Pembangunan ZI -WBK/WBBM



Sumber data : Kepegawaian 2023

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit merupakan komponen yang menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

12) Kegiatan-kegiatan Lainnya

Beberapa kegiatan yang diikuti oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT tahun 2023 sebagai berikut.

a) Dalam Rangka Kegiatan Pesparani Nasional II Tahun 2022 (28-31 Oktober 2022)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan Kontingen Pesparani Nasional II tahun 2022 untuk Provinsi Sulawesi Utara. Pendampingan dilakukan dengan memfasilitasi peserta mulai dari kedatangan sampai kepulangan dengan jumlah kontingen sebanyak kurang lebih 100 orang. Selain itu pada opening ceremony Pesparani Nasional II tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga ikut memeriahkan kegiatan dimaksud dengan membawakan Tarian Patanjanggung secara masal pada tanggal 28 Oktober 2022 bertempat di Stadion Oepoi-Kota Kupang.

Gambar 1.10 Penjemputan Kontingen Pesparani Nasional II tahun 2022 untuk Provinsi Sulawesi Utara



Sumber data : Kepegawaian 2022

b) Dalam Rangka ASEAN Summit 2023 (Labuan Bajo, 10-11 Mei 2023)

Gambar 1.11 Ucapan Selamat atas Pelaksanaan ASEAN Summit 2023



Sumber data : Kepegawaian 2023

Gambar 1.12 PS DistanKP Menyanyikan Lagu Benggong



Sumber data : Kepegawaian 2023

c) Dalam Rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (17 Agustus 2023), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti Toss Kenegaraan bertempat di rumah Jabatan Gubernur pukul 17.00 sampai selesai dengan memakai drescode perempuan atasan kebaya merah bawah menggunakan sarung tenunan sedangkan untuk laki-laki memakai kemeja merah lengan panjang dan

sarung tenun.

Gambar 1.13 Tim DistanKP dalam acara Resepsi Kenegaraan



Sumber data : Kepegawaian 2023

d) Dalam Rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-77, 17 Agustus 2022

Diadakan berbagai pertandingan/perlombaan di Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretariat, bidang dan UPTD wajib terlibat Aktif dengan mengikuti setiap kegiatan yang dilaksanakan. Pertandingan/perlombaan dimaksud sebagai berikut.

Gambar 1.14 Pembukaan Acara Semarak Kemerdekaan oleh Kepala Dinas



Gambar 1.15 Lomba Vokal Grup



Sumber Data : Kepegawaian 2023

Gambar 1.16 Pertandingan Volley



Sumber Data : Kepegawaian 2023

Gambar 1.17 Pertandingan Futsal Putra dengan Kostum Daster



Sumber Data : Kepegawaian 2023

Gambar 1.18 Ja'i Bersama



Sumber data : Kepegawaian 2023

Gambar 1.19 Lomba Guling Ban Traktor



Sumber Data : Kepegawaian 2023

e) Dalam Rangka memeriahkan HUT Republik Indonesia ke-78, 17 Agustus 2023

Setiap OPD diwajibkan untuk mengikuti lomba Paduan Suara dan Tarian Daerah dengan minimal peserta minimal 30 orang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT mendapat undian untuk lomba paduan suara lagu pilihan Nina Noi (daerah Timor) dan tarian daerah Okomama Etnis Timor. Busana yang dikenakan untuk lomba Paduan Suara dan Tarian Daerah adalah pakaian adat sesuai lagu daerah yang dibawakan, yakni etnis Timor. Video lomba Paduan Suara dan Tarian Daerah ditayangkan dan dipentaskan pada HUT RI ke 78 setelah Upacara Bendera Tingkat Provinsi NTT di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur.

Gambar 1.20 Penari DistankP dengan tarian Okomama Etnis Timor



Sumber Data : Kepegawaian 2023

f) Dalam Rangka HUT Korps Pegawai Republik Indonesia (29 November 2022 ke-51)

Lomba nyanyi Mars Korpri Dalam Rangka Menyongsong dan Memeriahkan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-51 Tanggal 29 November 2022.

g) Dalam rangka memeriahkan HUT KORPRI ke-52 Tahun 2023

Diselenggarakan perlombaan antar perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yaitu Lomba Volly Putra/i: Lomba Tennis Meja Putra/i, Lomba Catur dan Lomba KaryaTulis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT memenangkan beberapa mata lomba yaitu:

- 1) Juara I Lomba Tennis Meja Tunggal Putri
- 2) Juara I Lomba Tennis Meja Ganda Putri,
- 3) Juara III Lomba Catur Cepat
- 4) Juara I Lomba Volly Putra

Gambar 1.21 Juara Perlombaan dan Pertandingan DistanKP



Sumber Data : Kepegawaian 2023

h) Dalam Rangka HUT Provinsi NTT - 20 Desember 2022

Gambar 1.22 Penari DistanKP dalam Tarian Gawi



Sumber Data : Kepegawaian 2023

i) Dalam Rangka HUT Provinsi NTT - 20 Desember 2023

Upacara HUT Provinsi NTT bertempat di Depan Gedung Sasando kantor Gubernur NTT

Gambar 1.23 Upacara dalam rangka HUT NTT ke-65



Sumber Data : Kepegawaian 2023

j) Pemberian Plakat Pensiun bagi ASN yang telah mencapai Batas Usia Pensiun

Gambar 1.24 Penyerahan Plakat Pensiun bagi ASN



Sumber Data : Kepegawaian 2023

k) Kunjungan ke ASN yang sakit/meninggal dunia

Sekretaris Dinas Bersama Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mengunjungi ASN atas nama Ibu Pilomena Bao, berlokasi di Kabupaten Kupang yang mengalami penyakit stroke.

Gambar 1.25 Kunjungan ke ASN an. Pilomena Bao



Sumber Data : Kepegawaian 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT memimpin prosesi pemakaman ASN yang meninggal dunia atas nama Mury F. Uilly bertempat di kelurahan Airnona dan diikuti oleh seluruh ASN.

Gambar 1.26 Prosesi Pemakaman ASN an. Murry F. Uilly



Sumber Data : Kepegawaian 2023

l) Acara Natal dan Tahun Baru Tahun Bersama Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Gambar 1.27 Acara Tukar Kado Subbag KUM



Sumber Data : Kepegawaian 2023

m. Gerakan Peduli Sampah (GPS)

Partisipasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kegiatan GPS mulai tanggal 16 Juli s/d bulan Desember 2022 pada setiap hari sabtu yang dibuktikan dengan menyampaikan daftar hadir serta dokumentasi menggunakan aplikasi Open Camera. Lokasi kegiatan disampaikan oleh Koordinator Umum dari Biro Umum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Gambar 1.28 GPS di Jl. Soeharto Kec. Maulafa Kota Kupang



Dalam urusan ketatausahaan, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum melakukan aktifitas antara lain :

- a. Mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai
- b. Pengelolaan naskah dinas dan surat masuk keluar

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan naskah dinas dan surat masuk keluar tahun 2023 yaitu:

1) Merekap data surat masuk, terdiri dari :

- Pusat / Ditjen : 605 Surat
- Setda Provinsi NTT : 759 Surat
- Kabupaten : 696 Surat
- Kota : 108 Surat
- Sekretariat Dinas : 57 Surat
- Bidang : 215 Surat
- UPTD : 126 Surat

Total surat masuk tahun 2023 : 2.566 Surat.

2) Merekap data surat keluar, terdiri dari :

- Surat Keputusan (SK) : 314 surat
- Surat Perintah Tugas (SPT) : 360 Surat
- Berita Acara Serah Terima (BAST) : 1.486 Surat

- Surat biasa (umum) :
 - 1) Sekretariat : 1.243 Surat (termasuk nota dinas)
 - 2) Bidang : 1.160 Surat
 - 3) UPTD : 83 Surat

Jumlah surat keluar tahun 2023 : 4.646 Surat

3) Kegiatan pengelolaan arsip dinamis

Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip. Pengelolaan arsip dinamis meliputi:

- a) Arsip vital, merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- b) Arsip aktif, merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- c) Arsip inaktif, merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

Untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, pengelola arsip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT membuat:

- a) Klasifikasi arsip, membuat pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
- b) Jadwal retensi arsip, disusun berdasarkan pedoman retensi arsip yang telah dibuat. Pedoman retensi arsip merupakan ketentuan dalam bentuk petunjuk yang memuat retensi arsip masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi dasar dalam penyusunan jadwal retensi arsip di setiap lembaga Negara dan pemerintahan daerah.
- c) Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip, disusun sebagai dasar untuk melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan publik

terhadap akses arsip. Sebagai sumber informasi, arsip harus mudah diakses oleh publik, namun untuk pertimbangan keamanan dan melindungi fisik arsip maka perlu diatur ketentuan tentang pengamanan dan akses arsip dinamis.

Terakhir, dalam urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum bertanggung jawab dalam urusan :

- a) Kebersihan dan kenyamanan kantor, ruang kerja dan lingkungan kantor
- b) Pengamanan kantor
- c) Layanan hubungan masyarakat (humas) kepada instansi/pihak terkait.

2. SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG

Sarana dan Prasarana penunjuang dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri dari:

Tabel 1.11 Tabel Sarana Prasarana Penunjang

No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
1	Tanah	Provinsi, dan Kabupaten	72 Bidang	Bersertifikat
2	Kantor	Airnona	2 Buah	2 Berfungsi
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi
		Oebobo	5 Buah	Berfungsi
3	Rumah Dinas	Airnona	12 Buah	Berfungsi
		Noelbaki	1 Buah	Berfungsi
		Nonbes	1 Buah	Berfungsi
		Oelbubuk	2 buah	Berfungsi
4	Gudang	UPTD PSB/ Airnona	1 Buah	Berfungsi
		Noelbaki	2 Buah	Berfungsi
		Tarus	4 Buah	Berfungsi
		UPT Proteksi	1 Buah	Berfungsi
5	Laboraturium	UPT PSB Ainona	3 Unit	Berfungsi
6	Asrama A Kebun Dinas	Asrama	2 Unit	Berfungsi
7	Kendaraan Roda 6	Dinas	0 Unit	1 Unit Sudah Dilelang
8	Kendaraan Roda 4	Dinas	7 Unit	Berfungsi (2 Unit sudah dilelang)
9	Kendaraan Roda 2	Dinas	291 Unit	Berfungsi

No	Jenis Prasarana/Sarana	Lokasi	Jumlah	Keterangan
10	Traktor Roda 4	Dinas	4 Unit	Berfungsi
11	Komputer	-	6 Unit	Berfungsi
	PC Unit	-	1 Unit	Berfungsi
12	Kamera		1 Unit	Berfungsi
13	Laptop		16 Unit	Berfungsi
14	Scener		1 Unit	Berfungsi
15	Infokus		8 Unit	Berfungsi
16	Meja		221 Unit	Berfungsi
17	Kursi		336 Unit	Berfungsi
18	Alat Rontok Padi	Kupang, Nagekeo, Sikka, Rote Ndao, Mabar, dan Sumba Timur	6 Unit	Berfungsi

Sumber data : Kepegawaian Desember 2023

Gambar 1.29 Dokumentasi Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Gedung Sekretariat Lama



Gedung Sekretariat Baru



Gedung Sub Bagian Keuangan



Gedung Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Lama



Gedung Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Baru



Gedung Bidang PSP2HP Lama



Gedung Bidang P2P2HP Baru



Gedung Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan



Gedung Sekretariat (Sekdis dan KUM)



Gedung Sekretariat Baru (Kadis dan PDE)



Gambar 1.30 Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT
Tampak Atas



Sumber : Kepegawaian 2023

SUBSTANSI INOVASI, PENGHARGAAN & KERJASAMA

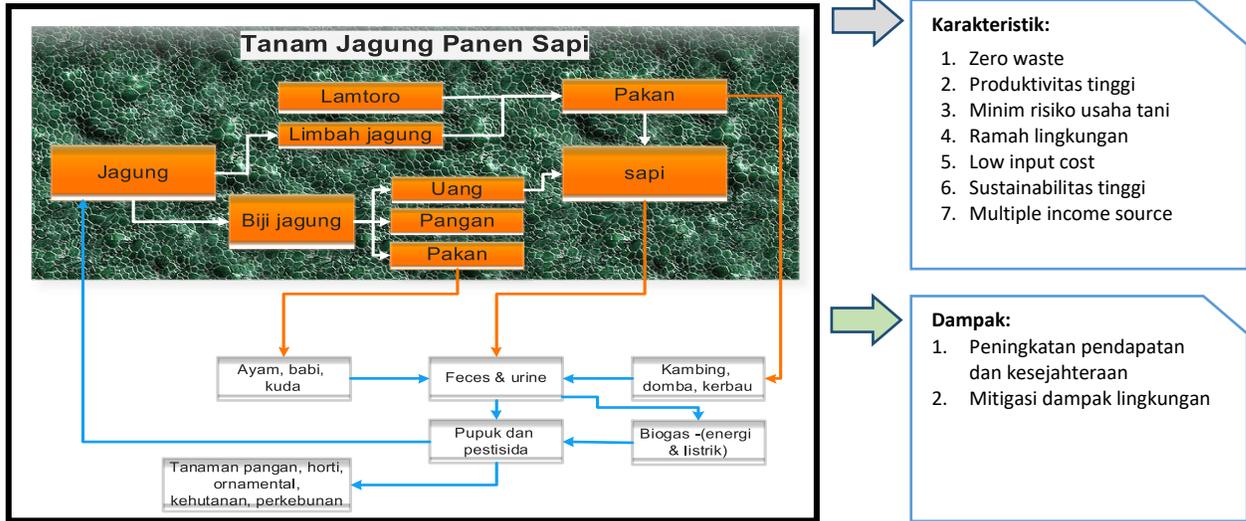
1. INOVASI

a) Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS)

Sejak tahun 2019 Pemerintah Provinsi NTT mengembangkan pertanian terintegrasi Jagung-Ternak dengan *tagline* Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang merupakan gerakan dan solusi pertanian terpadu (*Intergrated Farming System/IFS*) yang efektif dikembangkan di NTT guna meningkatkan produksi, produktivitas, mutu dan pendapatan petani. TJPS Pola Kemitraan (2022-2024), petani secara mandiri membiayai usahataniya melalui ekosistem pembiayaan disebut Wirausahawan Mandiri (Wiman). Penggunaan sarana produksi yaitu benih hibrida dengan produktivitas 7-13 ton/ha, pupuk nonsubsidi, obat-obatan, mekanisasi pengolahan lahan dan dukungan asuransi gagal panen.

Hasil produksi dijual ke *offtaker*, untuk melunasi kredit, pembelian ternak, memenuhi kebutuhan hidup dan tabungan. Dalam Pola Kemitraan terdapat 5 (lima) pilar yaitu: (1) Wiman sebagai pelaku utama; (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, PL TJPS dan penyuluh mendukung aspek manajemen dan teknis; (3) Lembaga Perbankan membiayai usahatani berbasis Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Non-KUR; (4) *Offtaker* memfasilitasi penyediaan sarana produksi dan pembelian hasil sesuai PKS antara *offtaker* dan wiman mengikuti harga pasar dengan batas bawah Rp.3.200/kg, (5) Lembaga terkait (TNI, POLRI dan lembaga lainnya) mendukung pengembangan aspek teknis, sosial dan ekonomi. Pada Pola Kemandirian (2025), Wiman telah mandiri dalam kegiatan usahataniya baik modal, akses perbankan, pemasaran hasil bersama *offtaker* dan hilirisasi produk serta ekosistem TJPS sudah berjalan secara digitasi.

Gambar 2.1. Model IFS Berbasis TJPS di Provinsi NTT



Sumber Data : Bidang PSP2HP

b) Brigade Alsintan

Brigade Alsintan tingkat Provinsi dengan Motto: Kami Hadir dengan Biaya Murah, Pelayanan Cepat dan Berkualitas dimaksudkan untuk memanfaatkan dan memobilisasi alsintan antar/lintas Kabupaten/Kota guna memenuhi permintaan dan kebutuhan petani/poktan/gapoktan dalam percepatan pengolahan tanah, penanaman dan panen. Jenis alsintan yang dikelola yaitu Traktor Roda 4: 73 unit, Combine Harvester: 5 Unit, Excavator: 2 Unit, Pompa Air: 180 Unit, Traktor Roda 2: 20 Unit, Cultivator: 20 Unit, Corn Combine: 2 Unit, Corn Sheller: 7 Unit yang tersebar di 13 Kabupaten dan Provinsi untuk melayani kebutuhan petani/poktan/gapoktan/Polri/TNI pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT.

Melalui brigade alsintan diharapkan petani/poktan/gapoktan dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Selain pelayanan dalam pembukaan lahan, pengolahan lahan dan panen, brigade alsintan juga melayani perbaikan alsintan dan sebagai sarana belajar bagi mahasiswa/pelajar(SMK)/petani/operator maupun semua pihak yang berkepentingan. Brigade Alsintan provinsi juga sebagai *role model* dalam sistem pelayanan penggunaan alsintan dan sudah diterapkan di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai, Kupang dan Sumba Timur.

Tujuan Brigade Alsintan yaitu:

- Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian;
- Meningkatkan penerapan teknologi dan mekanisasi pertanian;
- Meningkatkan penerimaan PAD;
- Petani mendapat pelayanan penggunaan alsintan dengan biaya yang relatif murah;
- Mempertahankan keberlanjutan masa pakai alsintan.

Output Brigade Alsintan pada tahun 2022 yaitu:

- Luasan yang terlayani dengan penggunaan Excavator seluas 80 Ha;
- Penanaman tepat waktu dan penghematan biaya tenaga kerja. Lahan yang terolah sampai dengan tahun 2022 seluas 1.789,66 Ha;
- Pemanenan padi tepat waktu, luasan panen terlayani seluas 32,13 Ha;
- Termanfaatnya TR2, Pompa Air, Cultivator, Penyosoh Sorgum dan Corn Sheller bagi petani.

Gambar 2.2 Brigade Alsintan

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

BRIGADE ALSINTAN
Kini Masyarakat/Petani
Semakin Muda Mendapatkan
Akses Alat dan Mesin Pertanian

**Hadir dengan BIAYA MURAH,
PELAYANAN CEPAT & BERKUALITAS**

**TERSEDIA DI PROVINSI
&
13 KABUPATEN**

Bajak **Rotari**

Guludan **Bedengan**

Excavator
Pembukaan Lahan Baru
Pembersihan Lahan
Pembuatan Jalan (Jalanan Tani)
Pembuatan Embung
Pembuatan Saluran Ringan
DII

Traktor
1. Bajak
2. Rotari
3. Guludan
4. Bedengan

Combines Harvester **Corn Conditioner**
Mesin Panen Padi Mesin Panen Jagung

Hubungi :
Ivony (081 238 985 745) Selvi (082 237 306 632) Evi (082 236 194 643)

Sumber Data : Bidang PSP2HP

c) “Digitasi Kepegawaian Terpadu (DIPADU)”

DIPADU dibuat karena Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah pegawai yang tergolong banyak, dari banyaknya pegawai tersebut sudah pasti terdapat banyak berkas yang perlu dikelola dan disimpan, dibutuhkan tidak sedikit ruang penyimpanan fisik untuk memfasilitasi keadaan tersebut sehingga dibutuhkanlah sebuah solusi dimana bisa menghemat penyimpanan berkas, serta keamanan dan juga mudahnya tata Kelola berkas. Inovasi “Digitasi Kepegawaian Terpadu (DIPADU)” melalui 2 tahapan yaitu :

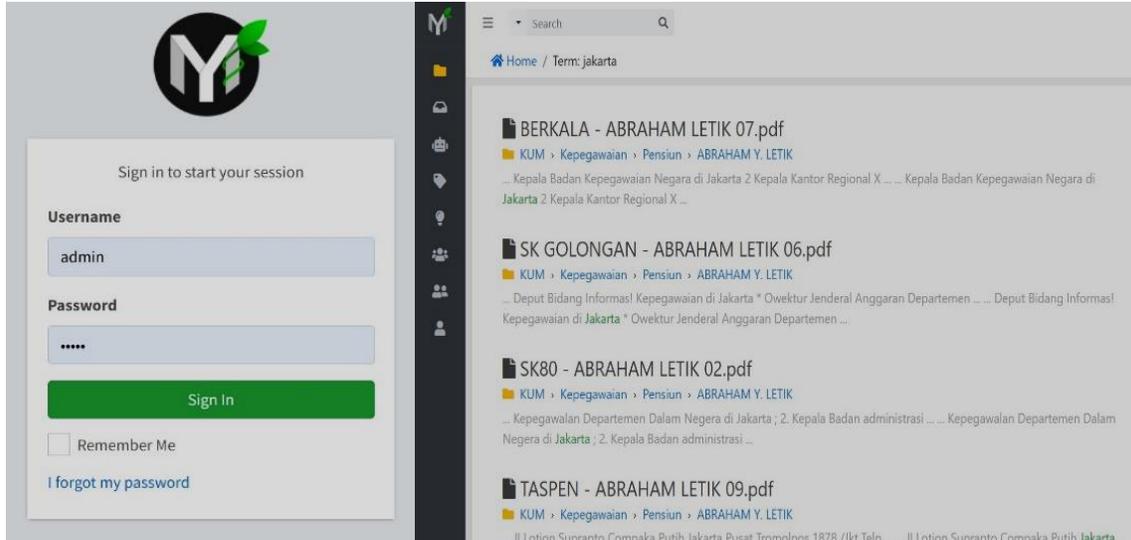
- a. Mengubah berkas fisik menjadi file digital atau digitasi
- b. Mengintegrasikan file digital tersebut kedalam sebuah *database management system (DBMS)*.

Pemanfaatan digitasi dan DBMS diharapkan memberikan kemudahan dalam menyimpan dan mengakses berkas pegawai dengan lebih mudah, sdapat mengelola data pegawai secara digital daripada dilakukan secara manual sehingga terciptanya efisiensi waktu dan meminimalkan *human error*, serta mewujudkan konsep pengelolaan berkas yang *paperless*. Keunikan inovasi “Digitasi Kepegawaian Terpadu (DIPADU)” adalah memanfaatkan teknologi untuk mengelola berkas, yaitu melalui tahap digitasi dan integrasi data ke DBMS. Pemanfaatan digitasi dan *database management system (DBMS)* telah memberikan dampak besar dalam banyak aspek kehidupan, mulai dari bisnis hingga pemerintahan. Digitasi adalah proses mengubah informasi analog atau fisik menjadi format digital yang dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah melalui komputer.

Salah satu manfaat utama digitasi adalah kemampuan untuk menyimpan dan mengelola data dalam jumlah besar. Dengan menggunakan DBMS, data dapat disimpan dalam format yang terstruktur dan diakses dengan cepat dan mudah. DBMS juga dapat membantu dalam mengorganisasi dan menganalisis data untuk membuat keputusan yang lebih baik. Pemanfaatan digitasi dan DBMS diharapkan memberikan kemudahan dalam menyimpan dan mengakses berkas pegawai dengan lebih mudah, serta dapat mengelola data pegawai secara digital daripada dilakukan secara manual sehingga terciptanya efisiensi waktu dan

meminimalkan *human error*.

Gambar 2.3 Aplikasi DIPADU



Sumber Data : Kepegawaian, 2023

d) EMOR (Efektif Mikro Organisme)

EMOR yang diperbanyak di UPTD Proteksi TPHP Provinsi NTT ada 3 jenis: (1) dari jenis bakteri yaitu PGPR; (2) dari Jenis Jamur yaitu *Trichoderma* dan (3) dari jenis gabungan bakteri dan jamur yaitu Mikro Organisme Lokal (MOL). Melalui pendanaan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Daerah petani diberikan bantuan Agens Pengendali Hayati (APH) untuk digunakan di lahan usaha taninya baik komoditi tanaman pangan, hortikultura maupun tanaman perkebunan. Setelah petani mencoba dan merasakan manfaat dari penggunaan APH tersebut, melalui kelompok tani diberikan bimbingan cara pembuatan APH dengan modal swadaya. Disamping itu dengan dana dari pusat dibentuk pula Pos Pelayanan Agens Hayati (PPAH) dan Klinik Pengendalian Hama Terpadu (Klinik PHT) di tingkat kelompok tani dengan bantuan sarana prasarana perbanyak APH.

Pemanfaatan APH berdampak positif terhadap pertumbuhan tanaman dan meningkatkan hasil 30 % s/d 50 % dibandingkan sebelum pemakaian APH. APH juga merupakan salah satu solusi untuk mengatasi isu kelangkaan pupuk yang lagi marak dan dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT melalui Labiratorium Pengamatan Hama Penyakit (LPHP) UPTD Proteksi TPHP telah melaksanakan terobosan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2022 mengajukan permohonan izin merek untuk produk APH dengan merek EMOR (Efektif Mikro Organisme) ke kemenkumham dan telah diberikan sertifikat merek dari Kemenkumham. Dengan adanya ijin merek memudahkan dalam mempromosikan dan legalitas pendistribusian pemanfaatan di lapangan.
2. Menetapkan tim pengelola Agens Pengendali Hayati (APH) oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT pada UPTD Proteksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
3. Sosialisasi, pendampingan dan pengawalan di lapangan tentang pemanfaatan APH.

e) APEHAKU

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui UPTD Perbenihan, Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati khususnya Laboratorium Hayati mengembangkan Agens Pengendali Hayati yang ramah lingkungan dan bermanfaat untuk mengendalikan penyakit dan hama yang menyerang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Adapun produk APEHAKU adalah Agens Pengendali Hayati yang dikembangkan dan ditemukan oleh Laboratorium Hayati yang antara lain; *Trichoderma harzianum*, *Trichoderma harzianum* (spesifik lokasi Kupang), *Metarhizium rileyi*, *Metarhizium anisopliae*, *Beauveria bassiana*, *Beauveria bassia* (strain belalang), Kumbang bervirus (*Baculovirus*), *Chilocorus*, *Cephalonomia*, *Tetrastichoides*, *Chelonus*, PGPR (*Plant Growth Promoting Rhizobacteria*) dan Bakteri *Paeni Bacillus*.

Jamur *Trichoderma* merupakan agen hayati yang telah banyak diteliti oleh para ahli tentang kemampuannya untuk mengendalikan jamur dan bakteri perusak tanaman. Produk komersial yang mengandung spora jamur ini bisa dijumpai di pasaran. Spesies yang banyak dibicarakan adalah *Trichoderma*. Jamur ini merupakan jamur saprofit yang hidup di tanah dan mudah diproduksi massal dengan media buatan, sedangkan Jamur *Beauveria bassiana* dan *Metarhizium* untuk mengendalikan serangga hama dengan cara masuk ke dalam tubuh serangga dan merusak sistem reproduksi serangga hama. PGPR sebagai pemacu pertumbuhan tanaman dan APH lainnya adalah parasit serangga hama.

APH dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap TPB antara lain:

1. Mengurangi penggunaan pestisida kimia: Penggunaan APH dapat mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan demikian, dapat membantu mengurangi dampak negatif penggunaan pestisida kimia pada kesehatan manusia, lingkungan, dan keanekaragaman hayati.
2. Meningkatkan produktivitas pertanian: APH dapat membantu meningkatkan produktivitas pertanian dengan mengendalikan hama dan penyakit tanaman yang dapat merusak hasil panen. Dalam jangka panjang, penggunaan APH dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, sehingga

dapat membantu mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

3. Meningkatkan keanekaragaman hayati: Penggunaan APH yang bersifat selektif dapat membantu menjaga keanekaragaman hayati di lingkungan pertanian atau perkebunan. Dengan cara ini, dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah kerusakan lingkungan akibat penggunaan pestisida kimia yang bersifat merusak.
4. Meningkatkan kesejahteraan petani: Penggunaan APH yang bersifat ramah lingkungan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Dalam jangka panjang, dapat membantu mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup petani.

2. PENGHARGAAN

Tabel 1.12. Penghargaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

<p>1</p>		<p>Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Provinsi NTT Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang</p> <p>Piagam Penghargaan di berikan Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur (249031, 249165 dan 249033) sebagai Satuan Kerja dengan Capaian Nilai IKPA tahun 2022 terbaik I Kategori DK/TP Kupang, 31 Januari 2023</p>
<p>2</p>		<p>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Piagam Penghargaan Nomor: KEP-61WPB.24/2023 diberikan kepada DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (249165) dengan predikat peringkat ketiga indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) triwulan IV ta 2022 kategori satker KD/TP</p>
<p>3</p>		<p>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Piagam Penghargaan DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (249031) dengan predikat peringkat pertama indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)</p>

		<p>triwulan IV TA 2022 kategori satker KD/TP</p>
<p>4</p>		<p>Kementerian Keuangan direktorat jendral Perbendaharaan Kanwil DJPB Provinsi NTT Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang</p> <p>Piagam Penghargaan diberikan Kepada Dinsa Pertanian Provinsi NTT (249160) sebagian satuan kerja penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Terbaik I Semester 2023</p>
<p>5</p>		<p>Kementerian Keuangan RI kantor wilayah DJPb Provinsi NTT Kantor pelayanan perbendaharaan negara Kupang</p> <p>Piagam penghargaan diberikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTT (249158) Sebagai Satker DK/TP dengan nilai IKPA terbaik II Periode Triwulan I tahun 2023</p>
<p>6</p>		<p>Komisi Informasi Provinsi NTT</p> <p>Ketebukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 Kategori Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT</p> <p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai badan Publik Informatif Kupang 18 Juli 2023</p>

7



Sertifikat Penghargaan diberikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Sebagai Apresiasi dan Penghargaan atas Penyelenggaraan Bimbingan Teknis & Sosialisasi BTS Propaktani Selama Tahun 2022

<p>8</p>		<p>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia "Sertifikat Merek"</p> <p>Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Kepada:</p> <p>Nama dan Alamat Pemegang Merek: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Jl. Polisi Militer No.7 Kel. Oebobo Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur Indonesia</p> <p>Tanggal Penerimaan: 04 Juni 2022</p> <p>Nomor Pendaftaran: IDM001053154</p> <p>Etiket Merek: EMOR</p> <p>Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 04 Juni 2032, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (pasal 35).</p> <p>Tanggal Penerimaan: 04 Juni 2022</p> <p>Nomor Pendaftaran: IDM001053154</p> <p>Etiket Merek: EMOR</p> <p>Perlindungan hak atas Merek tersebut diberikan untuk waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan sampai dengan tanggal 04 Juni 2032, dan Jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (pasal 35).</p>
<p>9</p>		<p>Piagam Penghargaan diberikan Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Atas Inovasi</p> <p>Pertanian Terintegrasi "TJPS" (Tanam Jagung Panen Sapi) Sebagai TOP 10 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022</p> <p>kupang, 15 Desember 2022</p>

<p>10</p>		<p>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Dorektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Piagam Penghargaan diberikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Nusa Tenggara Timur (249165)</p> <p>Dengan Predikat Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik 3 DK/TP se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III Tahun 2022 Kupang 9 Desember 2022</p>
<p>11</p>		<p>Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Dorektorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Piagam Penghargaan diberikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Nusa Tenggara Timur (249031) Dengan Predikat Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik 2 DK/TP se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Triwulan III Tahun 2022 Kupang 9 Desember 2022</p>

<p>12</p>		<p>Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Sekretariat Daerah</p> <p>Sertifikat Nomor:800/541/BKD1.3 diberikan Kepada Dinas Pertanian dan Ketahana Pangan sebagai Kategori Terbaik 3 Menyayikan Lagu MARS KORPRI Perangkat Daerah Lingkup Nusa Tenggara Timur</p> <p>Senin 28 November 2022</p>
<p>13</p>		<p>Kementerian Keungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Piagam Penghargaan diberikan kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Panga Prov. NTT (249165) Dengan Predikat Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik 2 Semester I Tahun 2022 Kategori Satker Dekonsentrasi/ Tugas Pembantuan</p> <p>Kupang, 25 Agustus 2022</p>
<p>14</p>		<p>Gubernur Nusa Tenggara Timur</p> <p>Piagam Penghargaan sesuai keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur nomor: 423/KEP/HK/2022 tanggal 13 Desember 2022 diberikan kepada: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pannga Provinsi NTT Yang Telah Memperoleh Sertifikat Sistem Menejemen Mutu ISO 9001:2015 (Certificate No.2021.SB.0460)</p> <p>Kupang, 13 Desember 2021</p>

<p>15</p>		<p>Kementerian Pertanian Republik Indonesia</p> <p>Piagam Penghargaan diberikan Kepada: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nusa Tenggara Timur Pembina Petani juara I Lomba Kebun Kopi Berproduksi Tinggi Tahun 2019</p> <p>Malang, 10 Desember 2019</p>
<p>16</p>		<p>Gubernur Nusa Tenggara Timur SERTIFIKAT</p> <p>Nomor: 002.06/004/BKD.3.3 Diberikan Kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Keberhasilan dalam pencapaian target 100% Penerapan sasaran kerja pegawai (SKP) Tahun 2022 melalui Aplikasi penilaian prestasi kerja (PPK) Online</p> <p>Kupang, Desember 2020</p>
<p>17</p>		<p>Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>Keterbukaan Informasi Badan Politik Tahun 2021 Kategori Badan Publik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Badan Publik "Cukup Informatif" Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Kupang, 11 November 2021</p>

<p>18</p>		<p>Nota Deklarasi Dukungan Bersama Pengembangan FOOD ESTATE (Kawasan Produksi Pangan) Di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur</p>
<p>19</p>		<p>AGROFOOD SERTIFIKAT Juara III Stand Terbaik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 20th Indonesia Agrofood Expo 2022 1-3 Juli 2022 Hall B- Jakarta Convention Center Jakarta, 3 Juli 2022</p>
<p>20</p>		<p>Anugerah Karya Pangan dan Pertanian dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Tahun 2021.</p>

Sumber : Kepegawaian 2023

SUBSTANSI KERJASAMA / KEMITRAAN & KUNJUNGAN

1. KERJASAMA / KEMITRAAN

- a. Kerja sama antara Petani Produsen Kopi Arabika Flores Bajawa dengan Koperasi Primer Papataki dan Koperasi Sekunder MPIG Kopi Arabika Flores Bajawa tentang "Pengembangan, Pengelolaan dan Perdagangan Hasil Produksi Kopi Masyarakat Peduli Indikasi Geografi di Kabupaten Ngada Provinsi NTT"
- b. Kerja sama antara Kelompok tani Produsen Kelor Wonga Wali dengan New Eden Moringa tentang "Pengembangan, pengelolaan dan perdagangan produk kelor di Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Barat Provinsi NTT"
- c. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan:
 - Korem 161/Wirasakti
 - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT
 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT
 - Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi NTT
 - BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT
 - PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero), Tbk
 - PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (BPD NTT)
 - PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
 - PT. Bank Rakyat Indonesia
 - PT. Bank Negara Indonesia
 - PT. Bank Tabungan Negara
 - PT. Bank KB Bukopin, Tbk
 - PT. Suakabumi
 - PT. Gama Agro Investama
 - PT. Seger Agro Nusantara
 - Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) NTT
 - CV. Duta Sentosa

Tentang “Ekosistem Pembiayaan Sektor Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Fasilitas Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Non Kredit Usaha Rakyat (Non-KUR) atau Pembiayaan Lainnya.”

- d. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PT. Talasi Tru Origin (Talasi Group) Nomor Pem.415.4.43/II/97/XII/2022 dan Nomor 002/MOU/TTO-HRD/XII/2022 tentang “Budidaya, pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Jambu Mete”
- e. Kesepakatan Bersama antara Universitas Brawijaya dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 128.1/UN10/KS/2021 dan Nomor: Pem.415.4.43.II/59/IX/2021 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- f. Perjanjian kerja sama antara Universitas Brawijaya dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 072.3/UN10/KS/2022 dan Nomor: 521.1/TPH/1872/2022 tentang Penguatan Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) Pola Kemitraan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Perjanjian Kerja sama antara Universitas Brawijaya dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 053.2/UN10/KS/2023 dan Nomor: 521.1/TPH/725/IV/2023 tentang Akselerasi dan Perluasan Program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK) Melalui Hilirisasi Teknologi Produksi Benih Jagung Hibrida Universitas Brawijaya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- h. Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tentang pelaksanaan Kegiatan TJPS melalui SMK – SMK di NTT dalam pengembangan jagung dan Pemberdayaan Ekonomi serta edukasi bagi anak – anak didikan di SMK untuk menuju kemandirian.

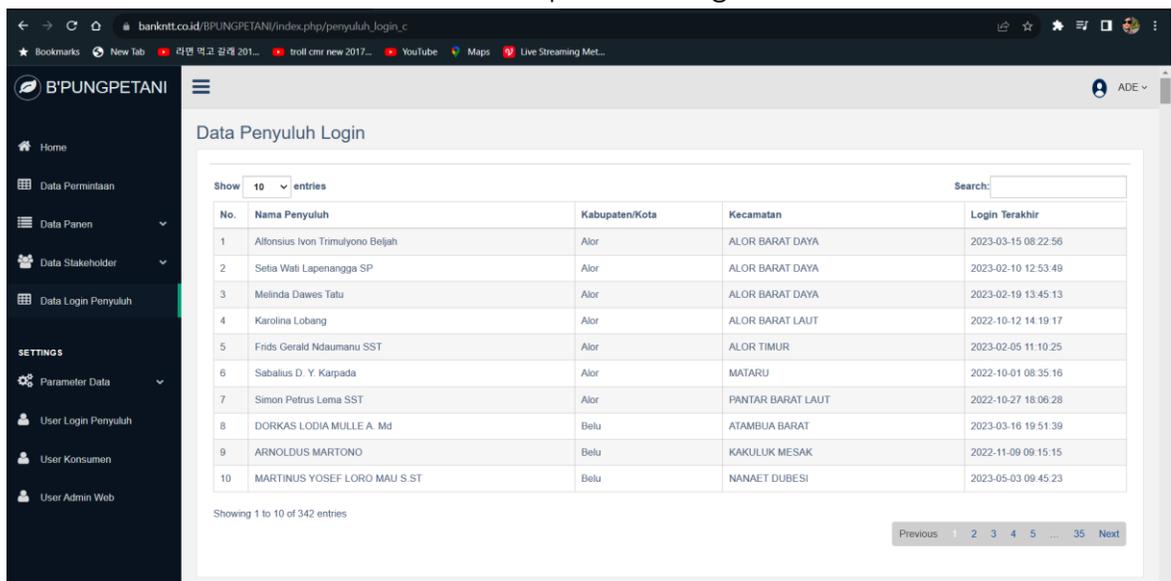
- i. Kerjasama dengan PRISMA dalam hal pemberdayaan penangkaran benih jagung di NTT sejak Tahun 2020 – 2023.

Gambar 2.4 Buku Pemberdayaan Penangkaran Benih Jagung di NTT



- j. Kerjasama dengan Bank NTT melalui digitalisasi Aplikasi BPung Petani untuk mengetahui rencana tanam petani untuk semua komoditi dan rencana hasil panennya sejak Tahun 2022 bersama Penyuluh Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Gambar 2.5 Aplikasi BPung Petani



2. KUNJUNGAN

- a. Menerima Tamu terkait tupoksi Distan KP (Pertemuan Evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi di Prov. NTT dengan Direktur Operasi dan Produksi Pupuk Gresik Kimia & tim

Gambar 3.1 Kunjungan Direktur operasi dan Produksi Pupuk Gresik Kimia & Tim



Sumber : Kepegawaian 2023

- 2) Menerima kunjungan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngada

Gambar 3.2 Kunjungan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngada



Sumber : Kepegawaian 2023

- 3) Pertemuan Satuan Tugas (satgas) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Badan Urusan Logistik (bulog) dan Kantor Pos

Gambar 3.3 Pertemuan Satgas Ketahanan Pangan Provinsi NTT



Sumber : Kepegawaian 2023

- 4) Kunjungan Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

Gambar 3.4 Kunjungan Komisi II DPRD Kabupaten TTS



Sumber : Kepegawaian 2023

5) Kunjungan Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sabu Raijua

Gambar 3.5 Kunjungan DPRD Kabupaten Sabu Raijua



Sumber : Kepegawaian 2023

6) Kunjungan Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka

Gambar 3.6 Kunjungan DPRD Kabupaten Malaka



Sumber : Kepegawaian 2023

- 7) Menerima Kunjungan Kepala dan Tim Badan Sertifikasi dan Instrumen Pertanian (BSIP) berdiskusi terkait standarisasi komoditas dan produk pertanian.

Gambar 3.7 Kunjungan Kepala dan Tim Badan Sertifikasi dan Instrumen Pertanian (BSIP)



Sumber : Kepegawaian 2023

- 8) Menerima Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi NTT sebagai mitra kerja untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di NTT sebagai dukungan anggaran APBD I dan APBN.

Gambar 3.8 Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi NTT





SUBSTANSI PROGRAM, DATA DAN EVALUASI

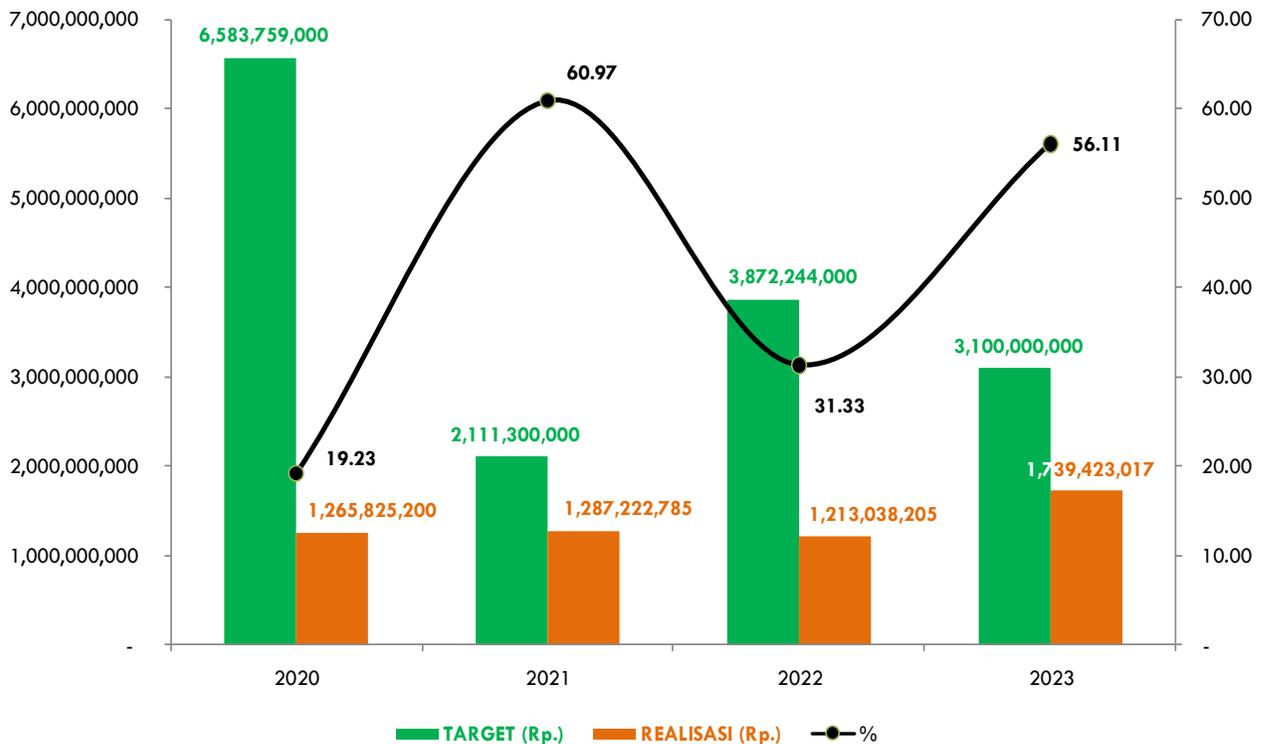
1. PROGRAM

1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

- Dalam rentan waktu 2020 – 2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan program dan kegiatan dari dua sumber anggaran yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari 10 Satker yang berada pada Kementerian Pertanian yaitu meliputi :
 1. TANAMAN PANGAN (DK) KODE SATKER 249099
 2. TANAMAN PANGAN (TP) KODE SATKER 249158
 3. HORTIKULTURA (DK) KODE SATKER 249030
 4. HORTIKULTURA (TP) KODE SATKER 249159
 5. PERKEBUNAN (DK) KODE SATKER 249031
 6. PERKEBUNAN (TP) KODE SATKER 249160
 7. PSP (DK) KODE SATKER 249033
 8. PSP (TP) KODE SATKER 249165
 9. PENYULUHAN (DK) KODE SATKER 403457
 10. KETAHANAN PANGAN (DK) KODE SATKER 249020
- Pada Tahun 2023, program dan kegiatan berasal dari tiga sumber anggaran karena Badan Ketahanan Pangan yang semula berada di bawah Kementerian Pertanian menjadi Badan Pangan Nasional, sehingga sejak Tahun 2023 Satker Ketahanan Pangan (DK) dengan KODE SATKER 249020 menjadi 690722 sedangkan 9 Satker yang lain tetap berada di bawah Kementerian Pertanian.

1.2. POTRET ALOKASI ANGGARAN

A. Penerimaan



Sumber : Substansi PDE Januari 2024

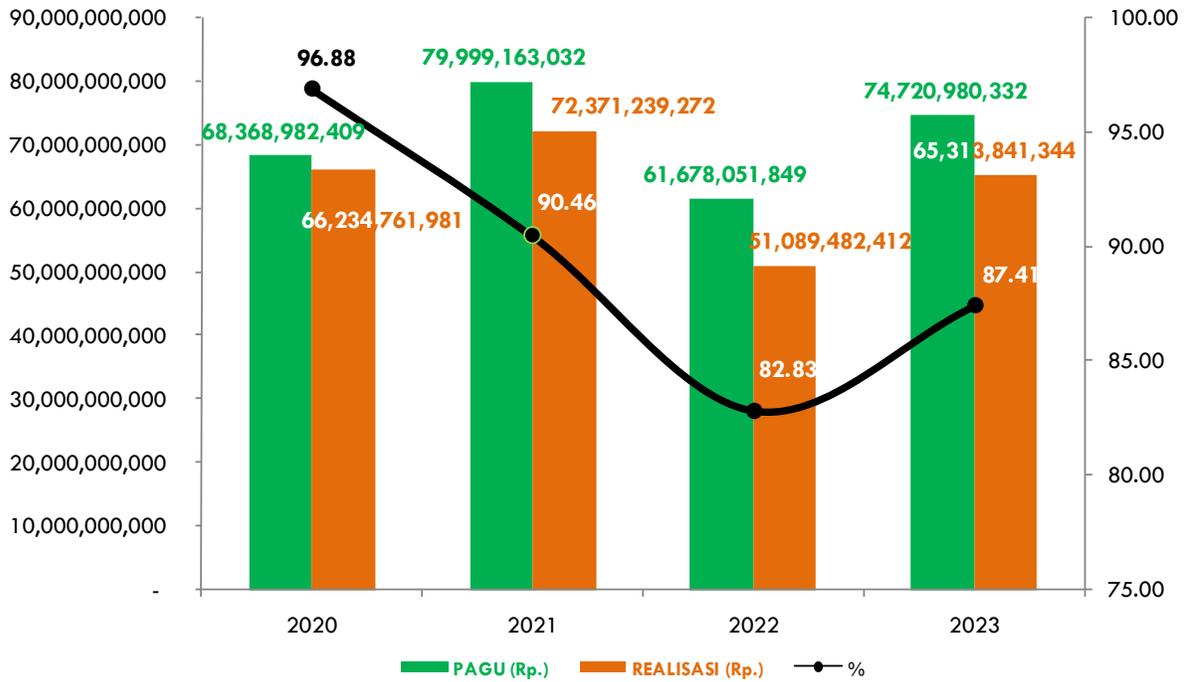
Gambar 1.1 PAD

Capaian Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir dengan capaian tertinggi pada Tahun 2021 sebesar 60,97% dengan target Rp. 2.111.300.000,- realisasi sebesar Rp. 1.287.222.785,-, sedangkan realisasi terendah pada Tahun 2020 yaitu sebesar 19,23% dengan target Rp. 6.583.759.000,- realisasi sebesar Rp. 1.265.825.200,-.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yaitu :

1. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan;
2. Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan / Pangsangrahan / Vila;
3. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman.

B. Belanja APBD

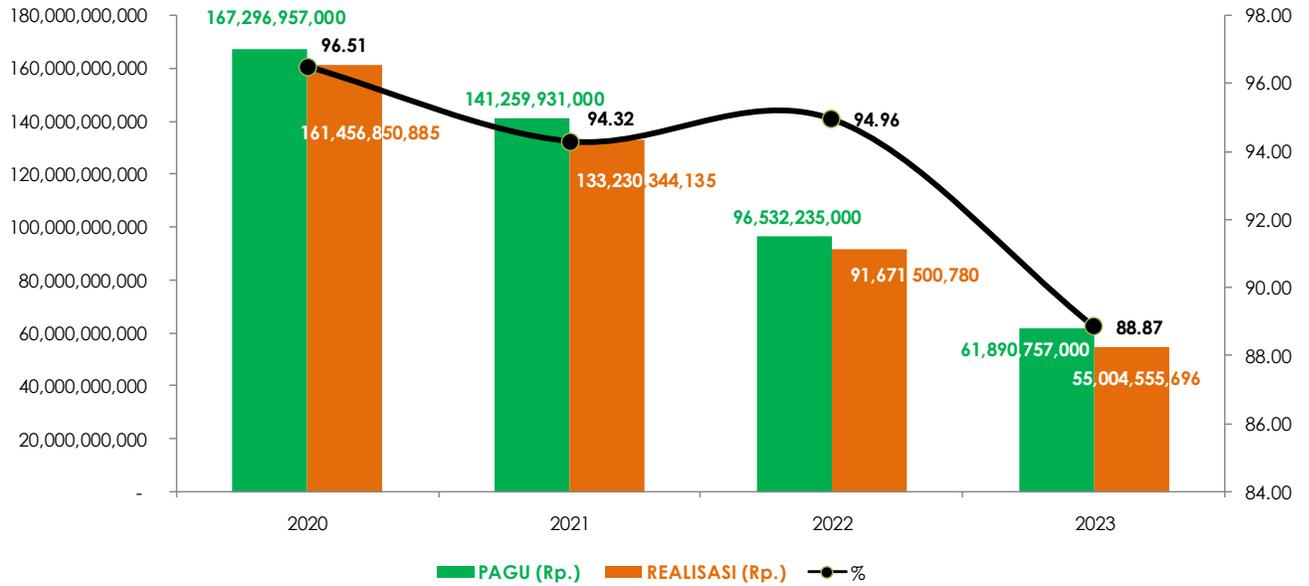


Sumber : Substansi PDE Januari 2024

Gambar 1. 2 Belanja APBD

Realisasi APBD tertinggi dari Tahun 2020 – 2023 yaitu pada Tahun 2020 yaitu sebesar 96,88% terendah pada Tahun 2022 yaitu sebesar 82,83%. Pagu APBD pada Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 68.368.982.409,- realisasi Rp. 66.234.761.981,-, sedangkan pada Tahun 2022 pagu APBD sebesar Rp. 61.678.051.849,-.

C. Belanja APBN



Sumber : Substansi PDE Januari 2024

Gambar 1. 3 Belanja APBN

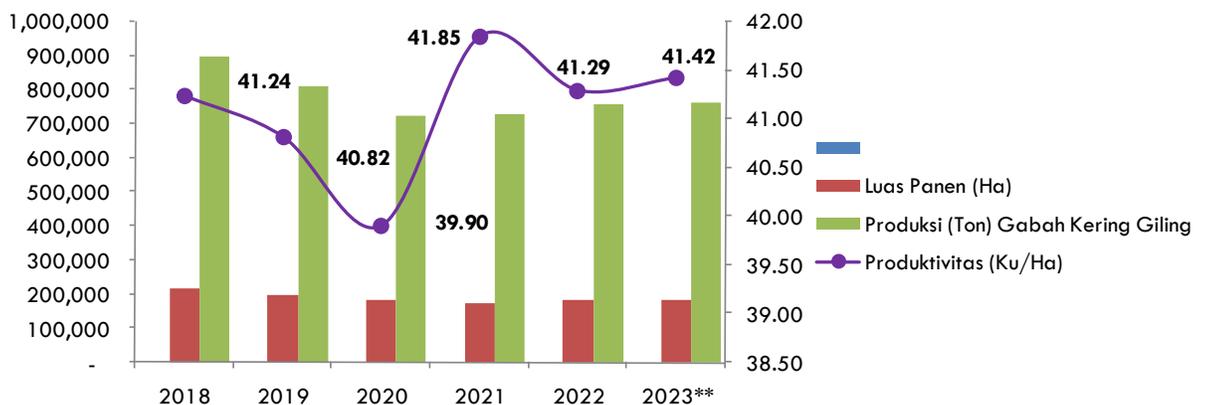
Belanja APBN pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dari 10 Satker, dan capaian realisasi tertinggi dari Tahun 2020 – 2023 yaitu pada Tahun 2020 sebesar 96,51% dan terendah sebesar 88,87% pada Tahun 2023. Total Pagu APBN Tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 167.296.957.000,-, realisasi Rp. 161.456.850.885,-, sedangkan pada Tahun 2023 total pagu sebesar Rp. 61.890.757.000,- dengan realisasi Rp. 55.004.555.696,-.

2. DATA

A. TANAMAN PANGAN

Data ini diperoleh dari metode Kerangka Sample Area (KSA) yang dilaksanakan BPS bekerja sama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Badan Informasidan Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

1. PADI

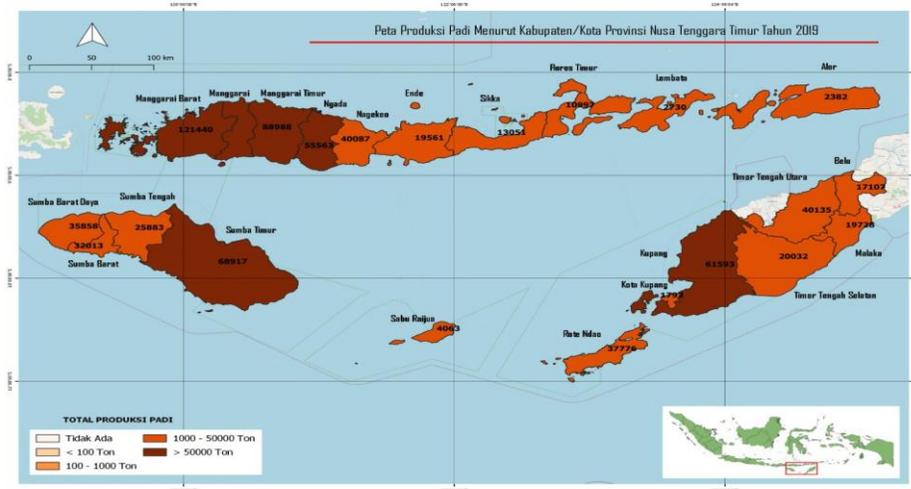


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

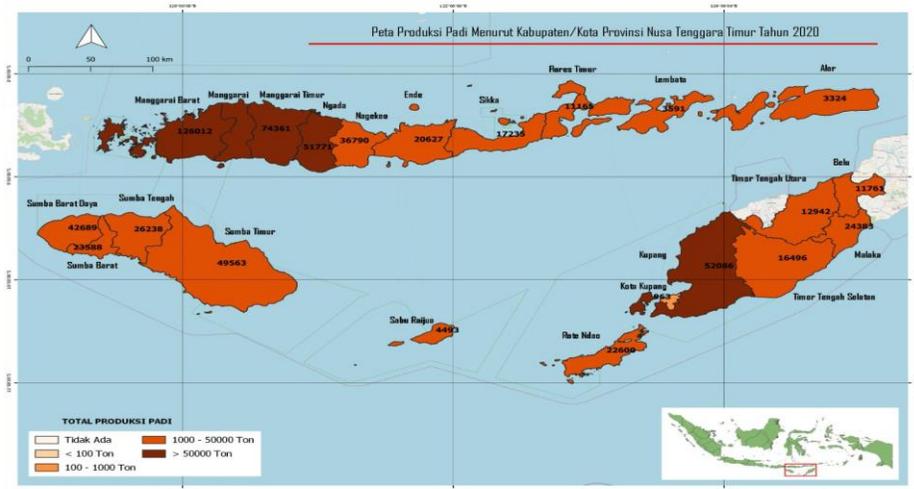
Gambar 1. 4 Data Produksi Padi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas padi tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2021 (41,85 Kw/Ha) dan terendah pada Tahun 2020 (39,90 Kw/Ha). Luas Penen di Tahun 2021 lebih rendah yaitu seluas 174.900 ha sedangkan pada Tahun 2020 Luas Panen sejumlah 181.691 ha. Produksi padi Tahun 2020 sebesar 725.024 ton Gabah Kering Giling (GKG), sedangkan di Tahun 2021 sebesar 731.878 ton Gabah Kering Giling (GKG).

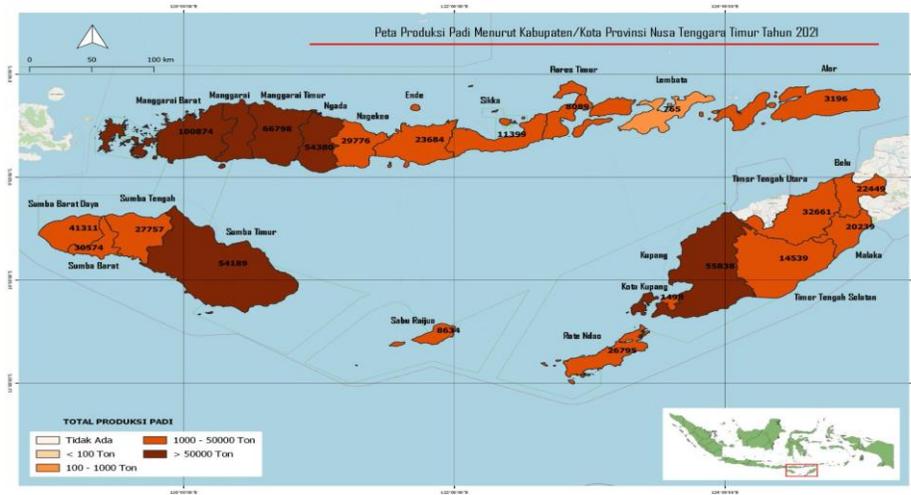
Peta Sebaran Padi Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada Gambar berikut.



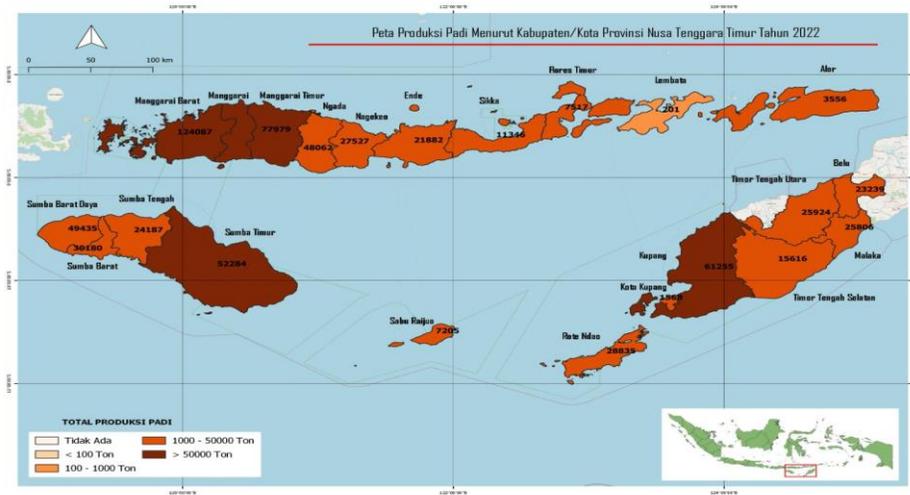
Gambar 1. 5 Peta Produksi Padi Menurut Kabupaten / Kota Provinsi NTT Tahun 2019



Gambar 1. 6 Peta Produksi Padi Menurut Kabupaten / Kota Provinsi NTT Tahun 2020

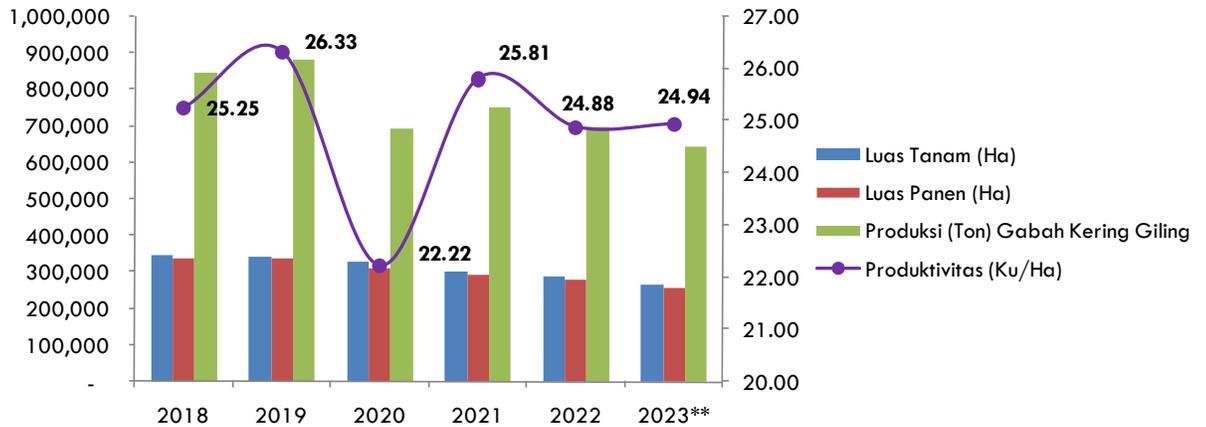


Gambar 1. 7 Peta Produksi Padi Menurut Kabupaten / Kota Provinsi NTT Tahun 2021



Gambar 1. 8 Peta Produksi Padi Menurut Kabupaten / Kota Provinsi NTT Tahun 2022

2. JAGUNG

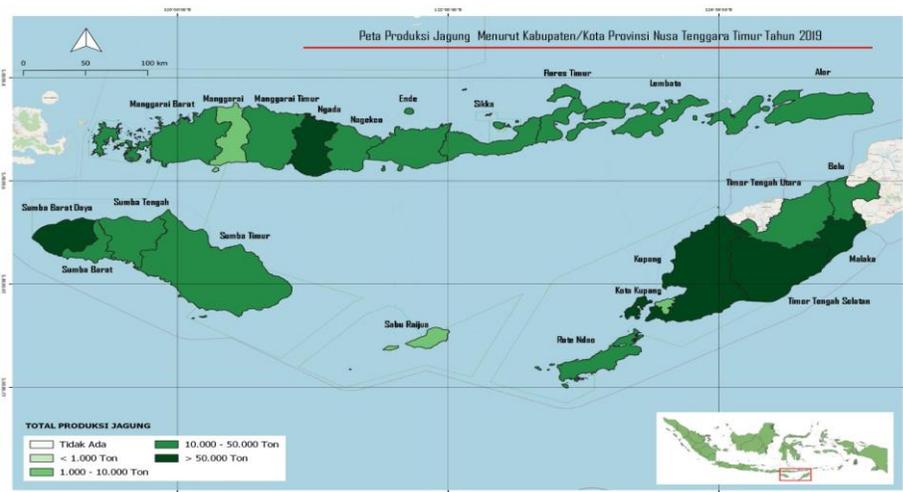


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 9 Data Produksi Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas jagung tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2019 (26,33 Kw/Ha) dan terendah pada Tahun 2020 (22,22 Kw/Ha). Luas Panen selama Tahun 2019 yaitu 335.901 ha dengan produksi sebesar 884.326 ton Pipilan Kering, sedangkan pada Tahun 2020 Luas Panen yaitu 311.876 ha dengan hasil produksi sebesar 693.081 ton Pipilan Kering.

Peta Sebaran Jagung Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.10.

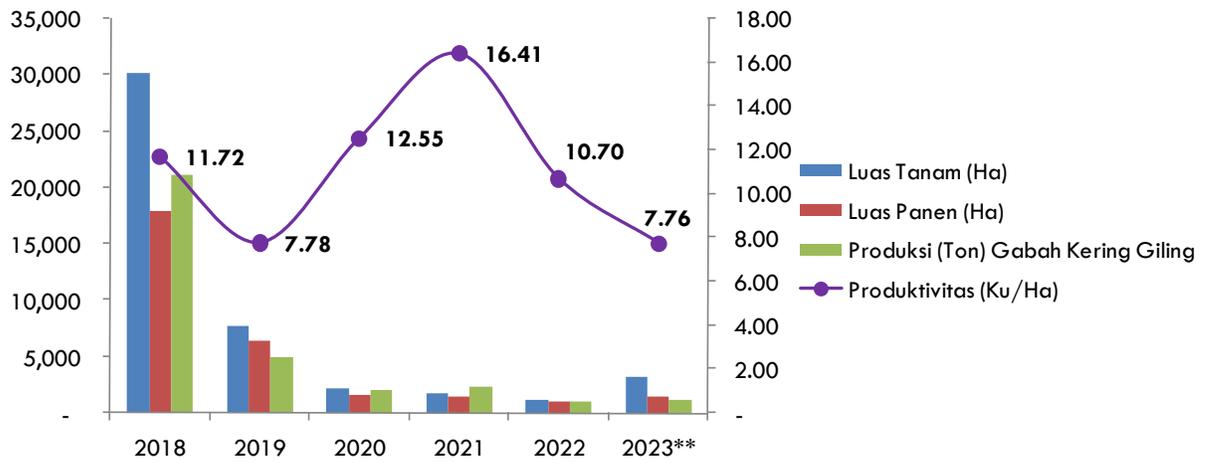


Gambar 1. 10 Peta Produksi Jagung Menurut Kabupaten / Kota Provinsi NTT Tahun 2019



Gambar 1. 12 Peta Produksi Jagung Menurut Kabupaten / Kota Provinsi NTT Tahun 2022

3. KEDELAI

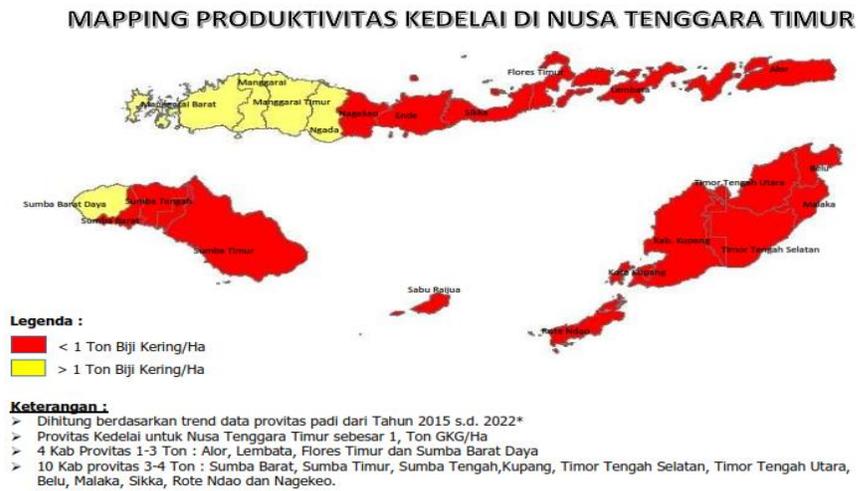


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 13 Data Produksi Kedele di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

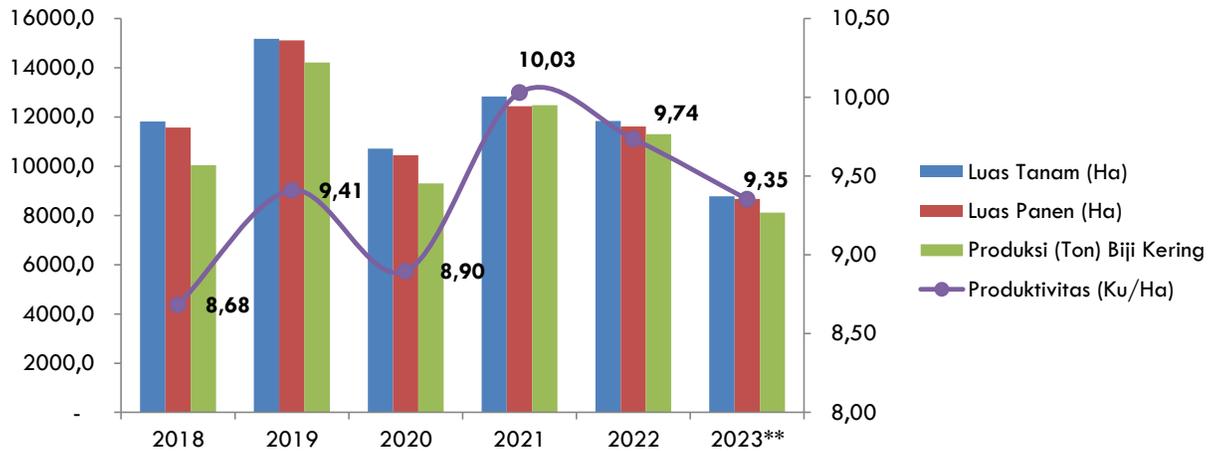
Produktivitas kedele tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2021 (16,41 Ku/Ha) dan terendah pada Tahun 2023 (7,76 Ku/Ha). Luas Panen selama Tahun 2021 sebesar 1.397 ha dengan produksi sebesar 2.293 ton Biji Kering, sedangkan pada Tahun 2020 Luas Panen yaitu 1.470 ha dengan hasil produksi sebesar 1.141 ton Biji Kering.

Peta Sebaran Kedele Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2019 – 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.14.



Gambar 1. 14 Mapping Produktivitas Kedelai di Nusa Tenggara Timur

4. KACANG TANAH

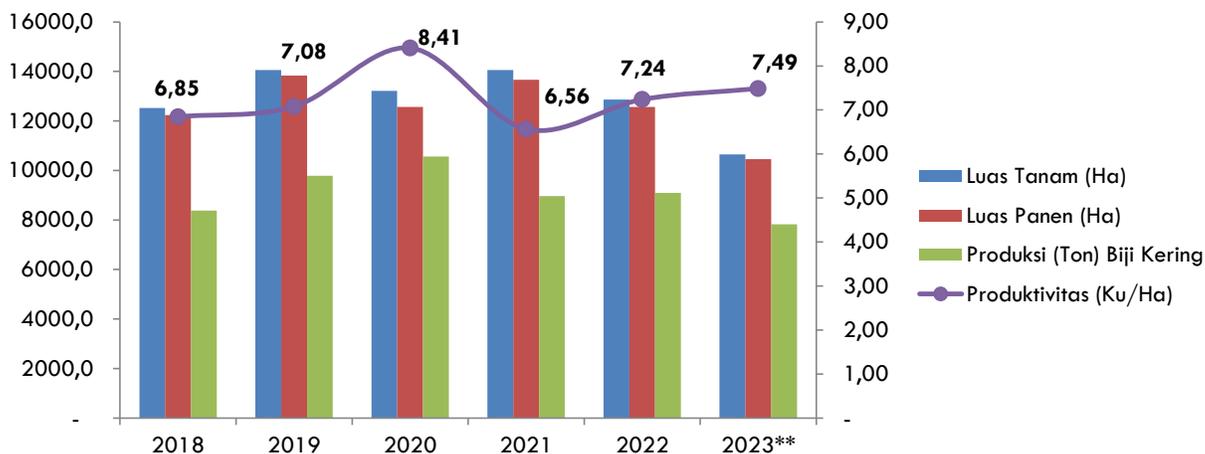


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 15 Data Produksi Kacang Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas kacang tanah tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2021 (10,03 Ku/Ha) dan terendah pada Tahun 2018 (8,68 Ku/Ha). Luas Panen selama Tahun 2021 sebesar 12.439 ha dengan produksi sebesar 12.475 ton Biji Kering, sedangkan pada Tahun 2018 Luas Panen yaitu 11.564 ha dengan hasil produksi sebesar 10.040 ton Biji Kering.

5. KACANG HIJAU

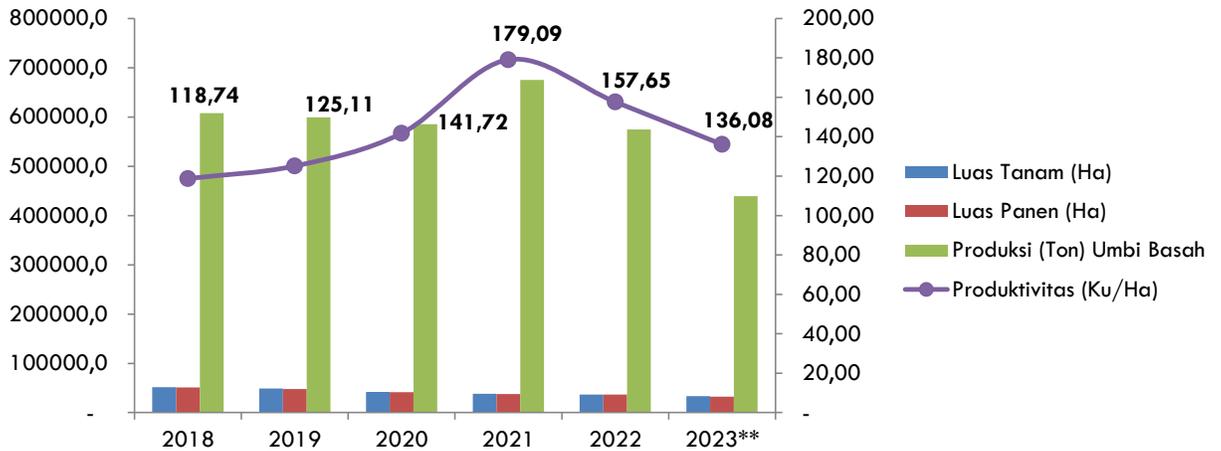


Keterangan : ** Angka Sementara
Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 16 Data Produksi Kacang Hijau di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas kacang hijau tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2020 (8,41 Ku/Ha) dan terendah pada Tahun 2021(6,56 Ku/Ha). Luas Panen selama Tahun 2020 sebesar 12.564 ha dengan produksi sebesar 10.566 ton Biji Kering, sedangkan pada Tahun 2021 Luas Panen yaitu 13.668 ha dan hasil produksi sebesar 8.971 ton Biji Kering.

6. UBI KAYU

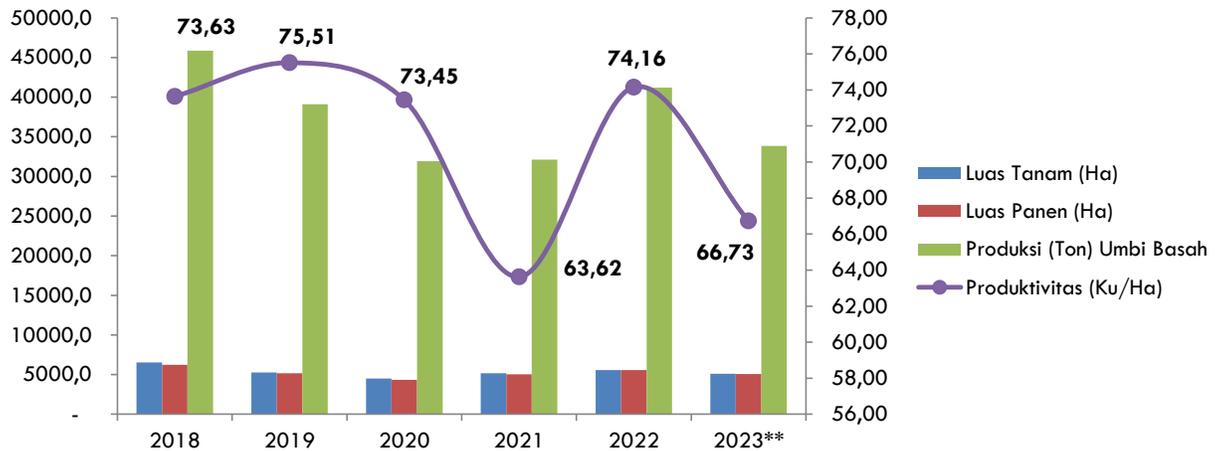


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 17 Data Produksi Ubi Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas ubi kayu tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2021 (179,09 Ku/Ha) dan terendah pada Tahun 2018 (118,74 Ku/Ha). Luas Panen selama Tahun 2021 sebesar 37.702 ha dengan produksi sebesar 675.182 ton Umbi Basah, sedangkan pada Tahun 2018 Luas Panen yaitu 51.180 ha dan hasil produksi sebesar 607.694 ton Umbi Basah.

7. UBI JALAR

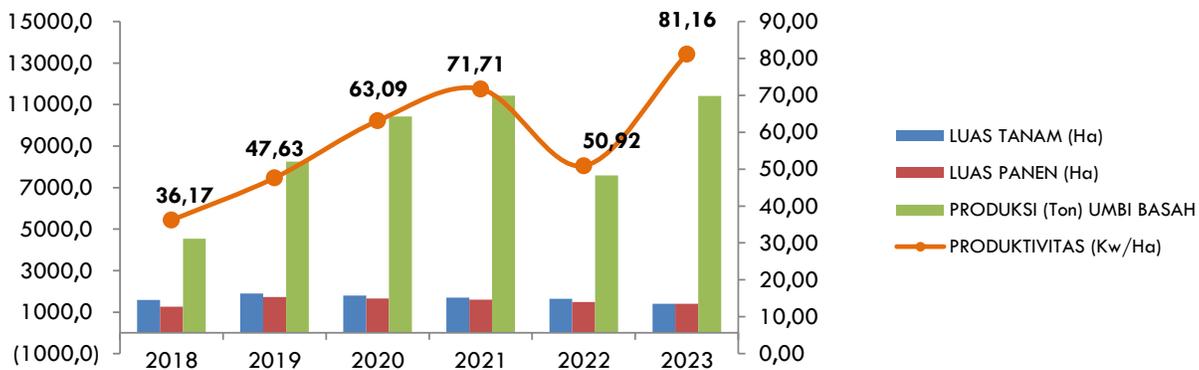


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 18 Data Produksi Ubi Jalar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas ubi jalar tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2019 (75,51 Ku/Ha) dan terendah pada Tahun 2021 (63,62 Ku/Ha). Luas Panen selama Tahun 2019 sebesar 5.178 ha dengan produksi sebesar 39.097 ton Umbi Basah, sedangkan pada Tahun 2021 Luas Panen yaitu 5.047 ha dan hasil produksi sebesar 32.107 ton Umbi Basah.

B. TANAMAN HORTIKULTURA
1. BAWANG MERAH

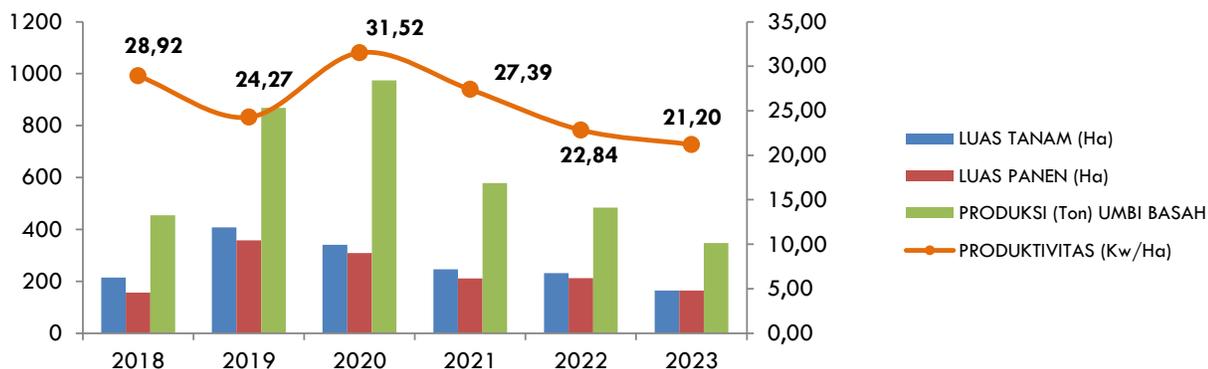


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 19 Data Produksi Bawang Merah di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas bawang merah tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2023 (81,16 Kw/Ha) dan terendah pada Tahun 2018 (36,17 Kw/Ha). Luas Panen selama Tahun 2023 yaitu 1.406 ha dengan produksi sebesar 11.411 ton Umbi Basah, sedangkan pada Tahun 2018 Luas Panen yaitu 1.256 ha dengan hasil produksi sebesar 4.543 ton Umbi Basah.

2. BAWANG PUTIH

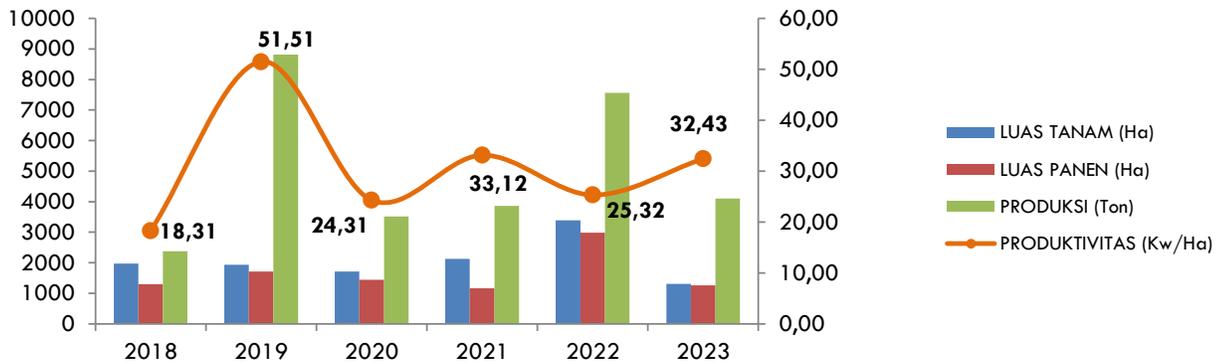


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 20 Data Produksi Bawang Putih di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas bawang putih tertinggi dari Tahun 2018 – 2022 yaitu pada Tahun 2020 (31,52 Kw/Ha) dan terendah pada Tahun 2023 (22,20 Kw/Ha). Luas Panen selama Tahun 2020 yaitu 309 ha dengan produksi sebesar 974 ton Umbi Basah, sedangkan pada Tahun 2023 Luas Panen yaitu 164 ha dengan hasil produksi sebesar 347,7 ton Umbi Basah.

3. CABAI RAWIT

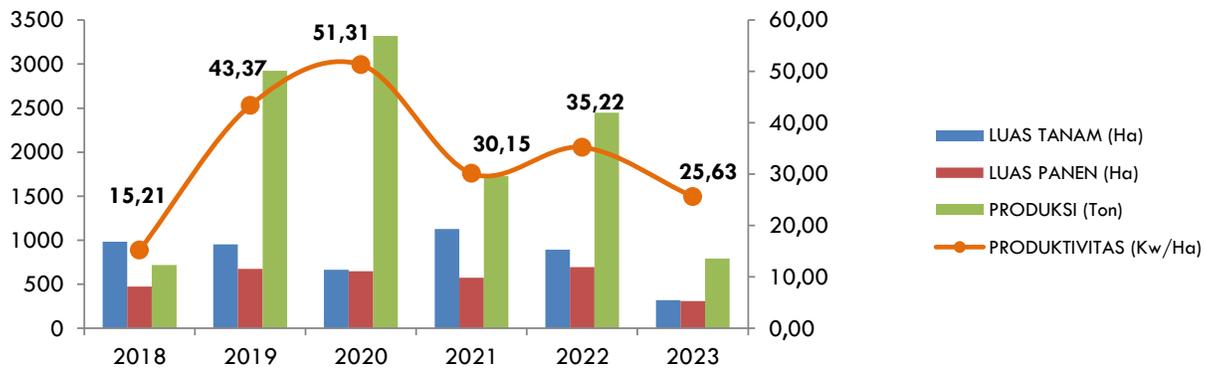


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 21 Data Produksi Cabai Rawit di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas cabe rawit tertinggi dari Tahun 2018 – 2022 yaitu pada Tahun 2019 (51,51 Kw/Ha) dan terendah pada Tahun 2018 (18,31 Kw/Ha). Luas Panen selama Tahun 2019 yaitu 1712 ha dengan produksi sebesar 8818 ton, sedangkan pada Tahun 2018 Luas Panen yaitu 1299 ha dengan hasil produksi sebesar 2378 ton.

4. CABAI BESAR



Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 22 Data Produksi Cabai Besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas cabe besar tertinggi dari Tahun 2018 – 2022 yaitu pada Tahun 2020 (51,31 Kw/Ha) dan terendah pada Tahun 2018 (15,21 Kw/Ha). Luas Panen selama Tahun 2020 yaitu 647 ha dengan produksi sebesar 3320 ton, sedangkan pada Tahun 2018 Luas Panen yaitu 473 ha dengan hasil produksi sebesar 719,2 ton.

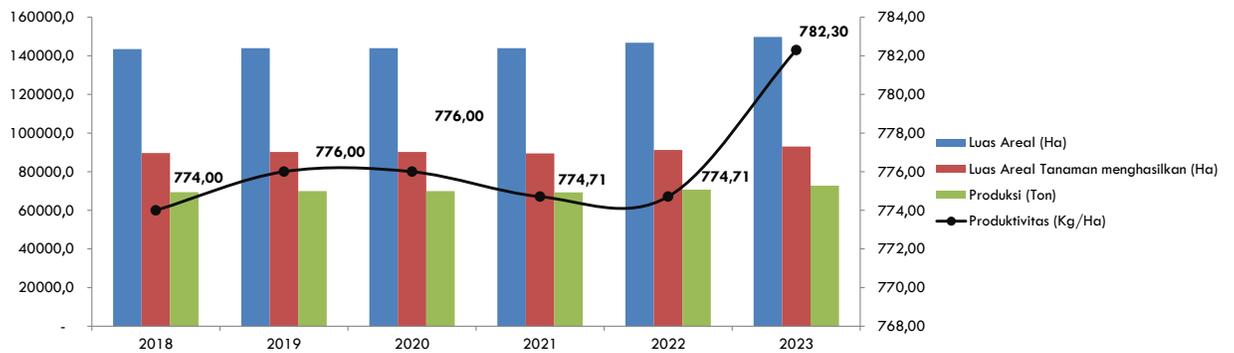
Peta Sebaran Komoditi Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.23.



Gambar 1. 23 Peta Sebaran Komoditi Unggulan Hortikultura Provinsi Nusa Tenggara timur 2020 - 2023

C. TANAMAN PERKEBUNAN

1. KELAPA

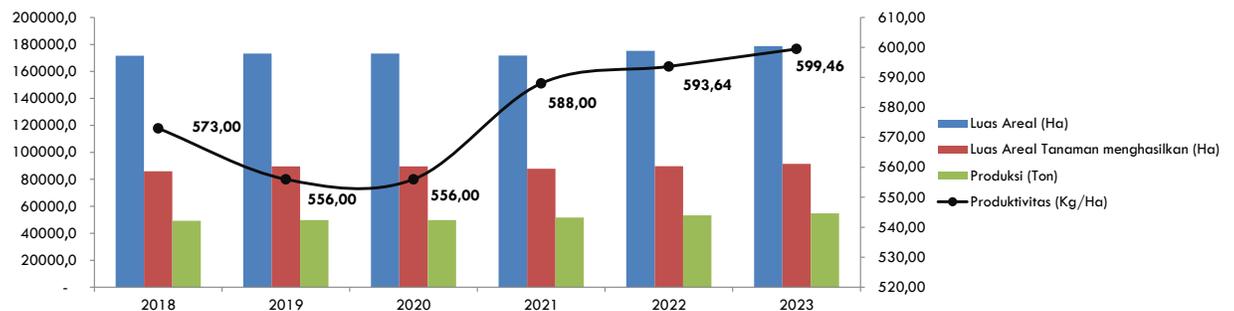


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 24 Data Produksi Kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas kelapa tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2023 (782,30 Kg/Ha) dan terendah pada Tahun 2018 (774,00 Kg/Ha). Luas Areal Tanaman menghasilkan selama Tahun 2023 yaitu 93.035 ha dengan produksi sebesar 72.781 ton, sedangkan pada Tahun 2018 Luas Areal Tanaman menghasilkan yaitu 89.687 ha dengan hasil produksi sebesar 69.408 ton.

2. JAMBU METE

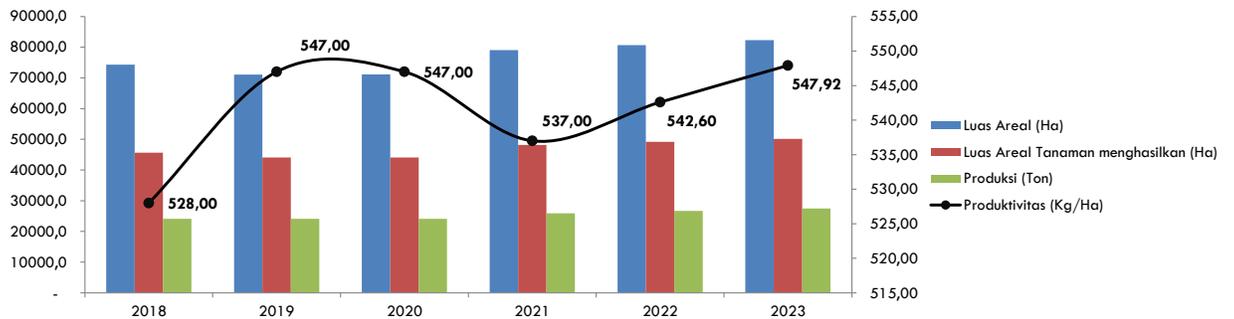


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 25 Data Produksi Jambu Mete di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas jambu mete tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2023 (599,46 Kg/Ha) dan terendah pada Tahun 2019 dan 2020 (556,00 Kg/Ha). Luas Areal Tanaman menghasilkan selama Tahun 2023 yaitu 91.445 ha dengan produksi sebesar 54.818 ton, sedangkan pada Tahun 2019 dan 2020 memiliki Luas Areal Tanaman menghasilkan yang sama yaitu 89.515 ha dengan hasil produksi sebesar 49.771 ton pada Tahun 2019 dan 49.774 ton pada Tahun 2020.

3. KOPI

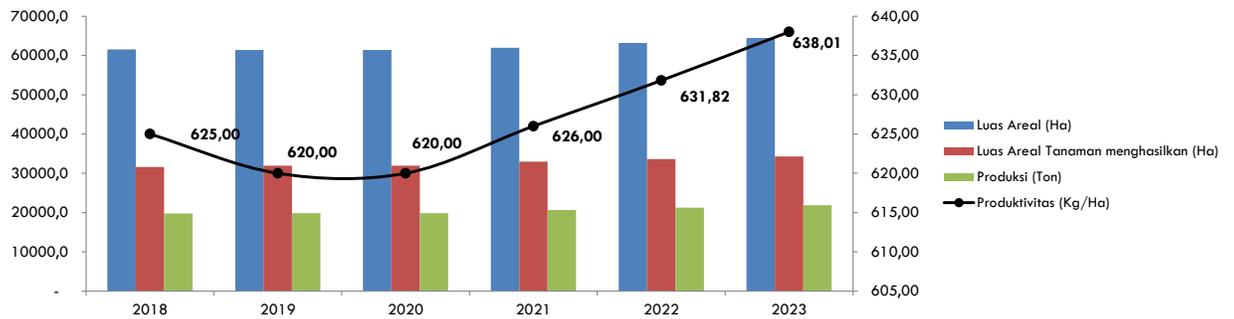


Keterangan : ** Angka Sementara
 Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 26 Data Produksi Kopi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas kopi tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2023 (547,92 Kg/Ha) dan terendah pada Tahun 2018 (528,00 Kg/Ha). Luas Areal Tanaman menghasilkan selama Tahun 2023 yaitu 50.141 ha dengan produksi sebesar 27.473 ton, sedangkan pada Tahun 2018 Luas Areal Tanaman menghasilkan yaitu 45.633 ha dengan hasil produksi sebesar 24.101 ton.

4. KAKAO



Keterangan : ** Angka Sementara
Sumber : Substansi PDE Februari 2024

Gambar 1. 27 Data Produksi Kakao di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023**

Produktivitas kakao tertinggi dari Tahun 2018 – 2023 yaitu pada Tahun 2023 (638,01 Kg/Ha) dan terendah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 (620,00 Kg/Ha). Luas Areal Tanaman menghasilkan selama Tahun 2023 yaitu 34.287 ha dengan produksi sebesar 21.876 ton, sedangkan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Luas Areal Tanaman menghasilkan yaitu 31.957 ha dengan hasil produksi sebesar 19.824 ton.

3. EVALUASI

Perjanjian Kinerja atau PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. PK Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Dokumen RKT dan DPA serta DIPA.

Selanjutnya, dari Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran yang tertulis dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT menjadi IKU Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT dalam rangka mendukung pencapaian IKU Gubernur yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT.

Indikator Kinerja Daerah (IKD) Gubernur yang merupakan Indikator Kinerja yang terkait langsung dengan PK Kepala Dinas yang selanjutnya menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT untuk bisa mencapai target yang ditentukan.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar yang menopang pemerintahan menuju *good governance* sehingga mampu menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerangka Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpanrb Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah PermenpanRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 1.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Instansi Pemerintah

Capaian	Kategori Capaian
1	2
$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
$70\% \leq X < 85\%$	Berhasil
$55\% < X < 70\%$	Cukup Berhasil
$X \leq 55\%$	Belum Berhasil

Tabel diatas merupakan acuan untuk menilai capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Capaian Indikator diukur dengan menggunakan formula apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT telah menyusun Indikator Kinerja yang menjadi kerangka acuan untuk menetapkan PK. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan semua program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dihitung persentase capaian kinerjanya guna menilai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan tiap tahunnya.

A. TAHUN 2020
A.1 PERJANJIAN LINERJA TAHUN 2020

Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET 2020
1	2	3	4	5
1.	Peningkatan Ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan	Persentase ketersediaan Pangan Utama	93%	97%
		Skor Pola Pangan Harapan	73 Point	84 Point
		Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	0,26%	1,15%
		Persentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura	-19,01%	1,25%
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan	0,19%	1,50%
		Persentase Pertumbuhan Produksi Marungga	NA	20%
		Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan di Tourism Estate	0	1,15%
		Persentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura di Tourism Estate	0	1,25%
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan di Tourism Estate	0	1,50%
		Proporsi Bahan Pangan Pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	NA	2

Sumber : LKIP Tahun 2020

Tabel 1.3 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020

A.	PENDAPATAN (Rp.)	6.583.759.000
B.	APBD	
	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.841.756.200
2	Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	323.735.100
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	13.715.000
4	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Daya Saing Pertanian Dan Ketahanan Pangan	27.944.083.253
5	Program NTT Bangkit	1.899.558.000
6	Program NTT Sejahtera	1.122.808.000
	Jumlah	33.145.655.553
C.	APBN	
	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (DK)	5.829.065.000
2	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan (TP)	65.284.140.000
3	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Hortikultura (DK)	2.633.136.000
4	Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Hortikultura (TP)	16.072.272.000
5	Program Peningkatan Produksi, Komoditas, Perkebunan Berkelanjutan (DK)	1.309.349.000
6	Program Peningkatan Produksi, Komoditas, Perkebunan Berkelanjutan (TP)	10.912.627.000
7	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (DK)	1.324.010.000
8	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (TP)	28.693.900.000
9	Program Peningkatan Diversifikasi, dan Ketahanan Pangan Masyarakat	13.636.374.000
10	Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian	22.294.654.000
	Jumlah	167.989.527.000
D.	PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	
1	Pencanangan Zona Integritas	Januari s/d Maret Tahun 2020
2	Pengembangan Zona Integritas	Januari s/d Juni Tahun 2020
3	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	75% dari sisa Temuan

A.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Tabel 1.4 Capaian Kinerja Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET 2020	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Peningkatan Ketersediaan, aksesibilitas, kualitas dan keamanan pangan	Persentase ketersediaan Pangan Utama	%	93	97	68,01	70,11	Cukup Berhasil
		Skor Pola Pangan Harapan	Poin	73	84	67,30	80,12	Berhasil
		Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan	%	26	1,15	-27,42	-2.384,35	Tidak Berhasil
		Persentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura	%	-19,01	1,25	34,85	2.788,00	Sangat Berhasil
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan	%	0,19	1,50	0,53	42,40	Belum Berhasil
		Persentase Pertumbuhan Produksi Marungga	%	NA	20	17,95	89,75	Sangat Berhasil
		Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan di <i>Tourism Estate</i>	%	0	1,15	49,96	3.996,80	Sangat Berhasil
		Persentase Pertumbuhan Produksi Hortikultura di <i>Tourism Estate</i>	%	0	1,25	37,45	2.996,00	Sangat Berhasil
		Persentase Pertumbuhan Produksi Perkebunan di <i>Tourism Estate</i>	%	0	1,50	0,20	16,00	Belum Berhasil
		Proporsi Bahan Pangan Pertanian dibandingkan seluruh hasil produksi untuk penanggulangan gizi buruk	%	NA	2	1,8	90,00	Sangat Berhasil

Sumber : LKIP Tahun 2020

B. TAHUN 2021

B.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel 1.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indikator Kinerja: *)	%	
		1 Produksi Tanaman Pangan (Ton)		
		a. Produksi Padi	Ton	1,360,249.00
		b. Produksi Jagung	Ton	1,318,802.00
		c. Produksi Kedelai	Ton	1,858.00
		d. Produksi Kacang Tanah	Ton	11,193.00
		e. Produksi Kacang Hijau	Ton	7,750.00
		2 Produksi Hortikultura (Ton)		
		a. Bawang Merah	Ton	4,842.00
		b. Cabe	Ton	8,239.00
		3 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)		
		a. Kelapa	Ton	78,594.00
		b. Kopi	Ton	26,836.00
		c. Kakao	Ton	22,898.00
		d. Jambu Mete	Ton	65,423.00
		e. Cengkeh	Ton	4,023.00
		f. Pinang	Ton	6,514.00
		4 Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Marungga		
		a. Produksi daun basah	Ton	1,300.00
		b. Produksi daun kering	Ton	130.00
		c. Produksi tepung marungga	Ton	13.00
		5 Pertumbuhan produksi tanaman pangan di kawasan pariwisata estate yang di fasilitasi		
		a. Produksi Bawang Merah	Ton	194.83
		b. Produksi Kentang	Ton	113.65
		c. Produksi Wortel	Ton	1,132.47
		d. Produksi Semangka	Ton	106.04
		e. Produksi Mangga	Ton	848.32
		6 Pertumbuhan Produksi Perkebunan di Kawasan Pariwisata Estate Yang di Fasilitasi		
a. Produksi Kelapa (Ton)	Ton	403.54		
b. Produksi Kopi (Ton)	Ton	456.72		
7 Persentase penggunaan benih bersertifikat	%	100.00		
2	Penyuluhan Pertanian	1 Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas		
		a. Kelas Pemula (Kelompok)	Kelompok	300.00
		b. Kelas Lanjut	Kelompok	100.00
		c. Kelas Madya (Kelompok)	Kelompok	10.00
		d. Kelas Utama (Kelompok)	Kelompok	1.00
2 Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (orang)	Orang	45.00		
3	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1 Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Perkapita Sesuai Angka Kecukupan Gizi di Kantong Kemiskinan dan Stunting (%)	%	2.87
		2 Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di Kantong Kemiskinan dan Stunting	%	10.20
		3 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	67.00
4	Penanganan Kerawanan Pangan	1 Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (%)	%	50.00
5	Pengawasan Keamanan Pangan	1 Persentase Peningkatan Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (%)	%	48.84

B.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Tabel 1.6 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (6/5x100)	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Indikator Kinerja: *)	%			100.00		
		1	Produksi Tanaman Pangan (Ton)					
			a. Produksi Padi	Ton	1,360,249.00	732,350.00	53.84	Belum Berhasil
			b. Produksi Jagung	Ton	1,318,802.00	751,948.00	57.02	Cukup Berhasil
			c. Produksi Kedelai	Ton	1,858.00	977.00	52.58	Belum Berhasil
			d. Produksi Kacang Tanah	Ton	11,193.00	11,068.00	98.88	Sangat Berhasil
			e. Produksi Kacang Hijau	Ton	7,750.00	11,467.00	147.96	Sangat Berhasil
			2	Produksi Hortikultura (Ton)				
			a. Bawang Merah	Ton	4,842.00	9,164.00	189.26	Sangat Berhasil
			b. Cabe	Ton	8,239.00	4,264.00	51.75	Belum Berhasil
			3	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)				
			a. Kelapa	Ton	78,594.00	69,276.00	88.14	Sangat Berhasil
			b. Kopi	Ton	26,836.00	25,896.00	96.50	Sangat Berhasil
			c. Kakao	Ton	22,898.00	20,620.00	90.05	Sangat Berhasil
			d. Jambu Mete	Ton	65,423.00	51,671.00	78.98	Berhasil
			e. Cengkeh	Ton	4,023.00	4,265.00	106.02	Sangat Berhasil
			f. Pinang	Ton	6,514.00	5,591.00	85.83	Sangat Berhasil
			4	Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Marungga				
			a. Produksi daun basah	Ton	1,300.00	20.00	1.54	Belum Berhasil
			b. Produksi daun kering	Ton	130.00	2.00	1.54	Belum Berhasil
	c. Produksi tepung marungga	Ton	13.00	0,2	-	Belum Berhasil		

Sumber : LKIP Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (6/5x100)	KATEGORI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5	Pertumbuhan produksi tanaman pangan di kawasan pariwisata estate yang di fasilitasi					
		a.	Produksi Bawang Merah	Ton	194.83	309.00	158.60	Sangat Berhasil
		b.	Produksi Kentang	Ton	113.65	83.00	73.03	Cukup Berhasil
		c.	Produksi Wortel	Ton	1,132.47	69.00	6.09	Belum Berhasil
		d.	Produksi Semangka	Ton	106.04	1,016.00	958.13	Sangat Berhasil
		e.	Produksi Mangga	Ton	848.32	206.00	24.28	Belum Berhasil
		6	Pertumbuhan Produksi Perkebunan di Kawasan Pariwisata Estate yang di Fasilitas					
		a.	Produksi Kelapa (Ton)	Ton	403.54	23.00	5.70	Belum Berhasil
		b.	Produksi Kopi (Ton)	Ton	456.72	390.20	85.44	Sangat Berhasil
7	Persentase penggunaan benih bersertifikat	%	100.00	100.00	100.00	Sangat Berhasil		
2	Penyuluhan Pertanian	1	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas					
		a.	Kelas Pemula (Kelompok)	Kelompok	300.00	197.00	65.67	Cukup Berhasil
		b.	Kelas Lanjut	Kelompok	100.00	1,828.00	1,828.00	Sangat Berhasil
		c.	Kelas Madya (Kelompok)	Kelompok	10.00	108.00	1,080.00	Sangat Berhasil
		d.	Kelas Utama (Kelompok)	Kelompok	1.00	-	-	Belum Berhasil
		2	Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama (orang)	Orang	45.00	105.00	233.33	Sangat Berhasil
3	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1	Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Perkapita Sesuai Angka Kecukupan Gizi di Kantong Kemiskinan dan <i>Stunting</i> (%)	%	2.87	4.60	160.28	Sangat Berhasil
		2	Prosentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di Kantong Kemiskinan dan <i>Stunting</i>	%	10.20	15.30	150.00	Sangat Berhasil
		3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	67.00	67.90	101.34	Sangat Berhasil
4	Penanganan Kerawanan Pangan	1	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan (%)	%	50.00	32.48	64.96	Cukup Berhasil
5	Pengawasan Keamanan Pangan	1	Persentase Peningkatan Produsen pangan segar terjamin keamanan pangan (%)	%	48.84	32.00	65.52	Cukup Berhasil

Sumber : LKIP Tahun 2021

C. TAHUN 2022
C.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Tabel 1.7 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN	SATUAN	TARGET	
1	2	3	4	5	
I	KINERJA UTAMA (60%)	Indikator Kinerja : *)	%	62,15	
		1	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	persen	13,45
		2	Nilai Tukar Petani (NTP)	poin	104,00
		3	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	poin	69,00
		Anggaran :			
		1	APBN **	Rupiah	97.896.065.000,00
		2	APBD:	Rupiah	65.550.295.846,00
		3	BELANJA	Rupiah	61.678.051.849,00
		4	PENDAPATAN ***	Rupiah	3.872.244.000,00
		II	KINERJA PENUNJANG (40%)	1	Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100%, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dipertanggungjawabkan
2	Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022			Nilai	3
3	Persentase Waktu LKPD masuk			%	1
4	Persentase Waktu LKPJ masuk			%	1
5	Persentase Waktu LKIP masuk			%	1
6	Nilai Pelaksanaan SAKIP minimal BB (>70-80)			Nilai	70,01
7	Nilai PMPRB minimal Kategori A (>80-90)			Nilai	80,01
8	Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%			%	100
9	Persentase Tindak Lanjut temuan BPK dan APIP:			%	
	a) TL Temuan dibawah tahun 2020; administrasi 100% Non Adminisrasi 75%			%	
	Administrasi 100%				50
	Non Administrasi 75%				317
	b) TL Temuan diatas tahun 2020; administrasi/Non Adminisrasi 90-100%			%	
10	Administrasi 90-100%				70
11	Non Administrasi 90-100%				24
12	Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001:2015			Sertifikat	1
13	Jumlah inovasi Perangkat Daerah minimal 5(lima) jenis			Inovasi	5
14	Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi e-Nadi paling lambat tanggal 1 Maret 2022	Dokumen e-Nadi	1		
15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik minimal kategori Baik (76,61-88,30)	Nilai	76,61		
16	Tingkat keterbukaan informasi pelayanan publik perangkat daerah minimal Kategori Menuju Informatif (75)	Skor	75		
17	Jumlah PKS dengan mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU perangkat daerah	PKS	8		

C.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Tabel 1.8 Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	5	7	
I	KINERJA UTAMA (60%)	Indikator Kinerja : *)	%	40,00	62,15	60,94	
		1	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	persen	13,33	13,45	12,31
		2	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	13,33	104,00	95,22
		3	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH)	Poin	13,33	69,00	75,30
		Anggaran :				20	
		1	APBN **	Rupiah	5	97.896.065.000,00	91.445.944.280,00
		2	APBD:	Rupiah	15	65.550.295.846,00	56.248.400.905,00
		3	BELANJA	Rupiah	10	61.678.051.849,00	55.037.362.700,00
		4	PENDAPATAN ***	Rupiah	5	3.872.244.000,00	1.213.038.205,00
		II	KINERJA PENUNJANG (40%)	1	Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100%, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dipertanggungjawabkan	Dokumen	2
2	Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022			Nilai	3	3	3
3	Persentase Waktu LKPD masuk			%	1	1	1
4	Persentase Waktu LKPJ masuk			%	1	1	1
5	Persentase Waktu LKIP masuk			%	1	1	1
6	Nilai Pelaksanaan SAKIP minimal BB (>70-80)			Nilai	7	70,01	73
7	Nilai PMPRB minimal Kategori A (>80-90)			Nilai	7	80,01	89,41
8	Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90%			%	3	100	100
9	Persentase Tindak Lanjut temuan BPK dan APIP:			%	4		
a)	TL Temuan dibawah tahun 2020; administrasi 100% Non Administrasi 75%			%	2		
	Administrasi 100%				1	50	16
	Non Administrasi 75%				1	317	245
b)	TL Temuan diatas tahun 2020; administrasi/Non Administrasi 90-100%			%	2		

NO	KOMPONEN PENILAIAN	INDIKATOR PENILAIAN	SATUAN	BOBOT	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	5	7	
II	KINERJA PENUNJANG (40%)	10	Administrasi 90-100%		1	70	38
		11	Non Administrasi 90-100%		1	24	21
		12	Memiliki sertifikat Manajemen ISO 9001:2015	Sertifikat	2	1	1
		13	Jumlah inovasi Perangkat Daerah minimal 5(lima) jenis	Inovasi	2	5	4
		14	Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Pengelolaan Tanda Tanga Elektronik melalui Aplikasi e-Nadi paling lambat tanggal 1 Maret 2022	Dokumen e-Nadi	4	1	1
		15	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik minimal kategori Baik (76,61-88,30)	Nilai	2	76,61	80,06
		16	Tingkat keterbukaan informasi pelayanan publik perangkat daerah minimal Kategori Menuju Informatif (75)	Skor	2	75	35,76
		17	Jumlah PKS dengan mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU perangkat daerah	PKS	2	8	8

Sumber : LKIP Tahun 2022

Tabel 1.9 Sasaran Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022			
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan						
		a. Padi	Ton	731,878.00	1,401,148.00	772,475.40	55.13	
		b. Jagung	Ton	750,166.00	1,410,367.00	654,921.40	46.44	
		c. Kacang Tanah	Ton	12,476.00	11,528.00	11,485.90	99.63	
		d. Kacang Hijau	Ton	8,971.00	7,982.00	7,645.20	95.78	
		Produksi Hortikultura						
		a. Bawang Merah	Ton	4,842.00	5,000.00	5,715.00	114.30	
		b. Cabe	Ton	8,239.00	8,485.00	8,359.00	98.52	
		Produksi Tanaman Perkebunan						
		a. Kelapa	Ton	78,594.00	82,960.00	67,857.00	81.79	
		b. Kopi	Ton	26,836.00	28,686.00	26,256.00	91.53	
		c. Kakao	Ton	22,898.00	24,534.00	20,787.00	84.73	
		d. Jambu Mete	Ton	65,423.00	70,941.00	53,007.00	74.72	
		e. Cengkeh	Ton	4,023.00	4,487.00	5,699.00	127.01	
		f. Pinang	Ton	6,514.00	6,974.00	5,773.00	82.78	
		Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Marungga						
		a. Produksi Daun Basah	Ton	20.00	1,300.00	402.8	30.98	
		b. Produksi Daun Kering	Ton	2.00	130.00	40,28	30.98	
		c. Produksi Tepung Marungga	Ton	0.20	13.00	4,02	30.92	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan di Kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi					
		a. Produksi Bawang Merah	Ton	194.83	197.75	266.00	134.51
		b. Produksi Kentang	Ton	113.65	115.99	57.00	49.14
		c. Produksi Wortel	Ton	1,132.47	1,155.82	318.00	27.51
		d. Produksi Semangka	Ton	106.04	108.22	498.90	461.01
		e. Produksi Mangga	Ton	848.32	865.81	163.00	18.83
		Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan di Kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi					
		a. Kelapa	Ton	403.54	416.42	398.56	95.71
		b. Kopi	Ton	456.72	471.30	398.00	84.45
		Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat	%	100.00	100.00	100.00	100.00
2	Penyuluhan Pertanian	Cakupan Peningkatan Kompetensi Kelompok Tani menurut Kelas					
		a. Kelas Pemula	Kelompok	300.00	600.00	1,448.00	241.33
		b. Kelas Lanjut	Kelompok	100.00	200.00	486.00	243.00
		c. Kelas Madya	Kelompok	10.00	20.00	7.00	35.00
		d. Kelas Utama	Kelompok	1.00	1.00	6.00	600.00
Cakupan Peningkatan Kompetensi Pelaku Utama	Orang	45.00	420.00	29,100.00	6,928.57		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan perkapita sesuai Angka Kecukupan Gizi di Kantong Kemiskinan dan <i>Stunting</i>	%	2.87	2.79	2.42	86.74
		Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Pokok Non Beras di Kantong Kemiskinan dan <i>Stunting</i>	%	10.20	10.20	15.30	150.00
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	67.00	69.00	75.30	109.13
		Persentase Peningkatan Produsen Pangan Segar Terjamin Keamanan Pangan	%	48.84	74.42	32.48	43.64
4	Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan	%	50.00	25.07	(14.28)	(56.96)
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Areal Serangan OPT yang dikendalikan	%	48.84	75.00	56.00	74.67

*Data KSA BPS dan SIMTP

*Data Angka Sangat Sementara Tahun 2022 Hortikultura dan Perkebunan

D. TAHUN 2023

D.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

a. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah

Tabel 1.10 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB (%)	12,31	12.72	Nilai tambah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di sektor pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) / nilai tambah barang dan jasa dari seluruh sektor ekonomi dalam kurun waktu 1 tahun x 100%
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (Poin)	95,22	105	Indeks harga yang diterima petani / Indeks harga yang dibayar petani x 100%
3	Meningkatnya keanekaragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Poin)	75,3	71	% Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan

Sumber : LKIP Tahun 2023

b. Pelaksanaan Anggaran

Tabel 1.11 Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

No	Uraian	Alokasi (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4
1.	APBD		
a.	Belanja (Program)	74.720.980.332	Realisasi minimal 85%
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	662.000.000	Realisasi minimal 90%
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	42.799.275.667	Realisasi minimal 85%
3	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	17.015.773.000	Realisasi minimal 85%
4	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	13.927.671.505	Realisasi minimal 85%
5	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	316.260.160	Realisasi minimal 85%
b.	Pendapatan	3.100.000.000	Realisasi minimal 90%
Jumlah Belanja + Pendapatan (APBD)		77.820.980.332	
2.	APBN		
	Program (Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan)		
1	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Tanaman Pangan)	3.875.123.000	Realisasi minimal 90%
2	Dukungan Manajemen (DK Satker Tanaman Pangan)	60.200.000	Realisasi minimal 90%
3	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Tanaman Pangan)	2.086.240.000	Realisasi minimal 90%
4	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Tanaman Pangan)	14.972.750.000	Realisasi minimal 90%
5	Dukungan Manajemen (TP Satker Tanaman Pangan)	1.392.107.000	Realisasi minimal 90%
6	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Hortikultura)	1.388.944.000	Realisasi minimal 90%
7	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Hortikultura)	3.250.550.000	Realisasi minimal 90%
8	Dukungan Manajemen (TP Satker Hortikultura)	250.000.000	Realisasi minimal 90%
9	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (DK Satker Hortikultura)	126.192.000	Realisasi minimal 90%
10	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Hortikultura)	2.870.315.000	Realisasi minimal 90%
11	Dukungan Manajemen (DK Satker Hortikultura)	1.274.000.000	Realisasi minimal 90%
12	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (DK Satker Perkebunan)	198.400.000	Realisasi minimal 90%
13	Dukungan Manajemen (DK Satker Perkebunan)	396.310.000	Realisasi minimal 90%
14	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (TP Satker Perkebunan)	1.608.584.000	Realisasi minimal 90%
15	Dukungan Manajemen (TP Satker Perkebunan)	225.191.000	Realisasi minimal 90%
16	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (TP Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	8.166.633.000	Realisasi minimal 90%
17	Dukungan Manajemen (TP Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	1.269.930.000	Realisasi minimal 90%
18	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	566.800.000	Realisasi minimal 90%
19	Dukungan Manajemen (DK Satker Prasarana dan Sarana Pertanian)	340.000.000	Realisasi minimal 90%
20	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	14.024.934.000	Realisasi minimal 90%
21	Ketersediaan, akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (DK Satker Ketahanan Pangan)	3.437.554.000	Realisasi minimal 90%
22	Dukungan Manajemen (DK Satker Ketahanan Pangan)	110.000.000	Realisasi minimal 90%
Jumlah Dekonsentrasi + Tugas Pembantuan		61.890.757.000	Realisasi minimal 90%

Sumber : LKIP Tahun 2023

- c. Belanja Menggunakan Aplikasi E-Purchasing Minimal 40% dari Pagu Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah;
- d. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2023; Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
- e. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal BB (>70-80);
- f. Rata-rata realisasi Kinerja Individu dalam SKP minimal 90 %;
- g. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP sebagai berikut:
 - 1. TL temuan tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
 - 2. TL temuan dibawah tahun 2023: Administrasi 100%, Keuangan 80%;
- h. Jumlah Inovasi Perangkat Daerah Minimal minimal 2 (dua) Jenis;
- i. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi SRIKANDI paling lambat Januari 2023;
- j. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);
- k. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (76,99);
- l. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak Lain yang mendukung Pencapaian Target IKU Perangkat Daerah.

D.2 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Tabel 1.12 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi 2022	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Share PDRB Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) terhadap total PDRB	%	12.31	12.72	29.24	229.87
2	Meningkatnya Kontribusi Pertanian terhadap PDRB	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	95.22	105	97.54	92.90
3	Meningkatnya Keanekaragaman Pangan yang dikonsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Poin	75.30	71	74.37	104.75

Sumber : LKIP Tahun 2023

Tabel 1.13 Capaian Kinerja atas Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023		
					Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan					
		a. Padi	Ton %	756,050.00	1,471,176.00 95.24	766,629.00**	52.11
		b. Jagung	Ton %	698,023.00	1,853,552.00 100.00	649,753.00**	35.05
		c. Kacang Tanah	Ton %	11,309.00	12,108.00 100.00	7,294.00**	60.24
		d. Kacang Hijau	Ton %	9,093.00	8,382.00 100.00	8,577.00**	102.33
		Produksi Hortikultura					
		a. Bawang Merah	Ton %	7,585.00	5,264.00 100.00	11,203.00**	212.82
		b. Cabe	Ton %	10,011.70	8,910.00 100.00	5,884.00**	66.04
		Produksi Tanaman Perkebunan					
		a. Kelapa	Ton %	69,101.89	87,327.00 100.00	64,652.16*	74.03
		b. Kopi	Ton %	25,354.83	30,846.00 100.00	25,131.31*	81.47
		c. Kakao	Ton %	21,332.81	27,260.00 100.00	21,410.65*	78.54
		d. Jambu Mete	Ton %	52,915.67	78,823.00 100.00	52,845.98*	67.04
		e. Cengkeh	Ton %	4,203.68	5,158.00 100.00	4,241.82*	82.24
		f. Pinang	Ton %	5,515.29	7,664.00 100.00	5,477.86*	71.48
		Persentase Pertumbuhan Produksi Tanaman Marungga					
		a. Produksi Daun Basah	Ton %		1,300.00 100.00	148.10*	11.39
		b. Produksi Daun Kering	Ton %		130.00 100.00	29.62*	22.78
		c. Produksi Tepung Marungga	Ton %		13.00 100.00	6.09*	46.85
		Pertumbuhan Produksi Tanaman Pangan di Kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi					
		a. Produksi Bawang Merah	Ton %	1,231.30	200.72 100.00	4,475.50**	2,229.72
		b. Produksi Kentang	Ton %	65.00	117.17 100.00	57.00**	48.65
		c. Produksi Wortel	Ton %	44.00	1,167.50 100.00	56.00**	4.80
		d. Produksi Semangka	Ton %	498.50	109.32 100.00	520.00**	475.67
		e. Produksi Mangga	Ton %	668.30	874.56 100.00	490.00**	56.03
		Pertumbuhan Produksi Tanaman Perkebunan di Kawasan Pariwisata Estate yang difasilitasi					
		a. Kelapa	Ton %	398.56	429.30 100.00	64.00*	14.91
		b. Kopi	Ton %	398.00	485.88 100.00	386.00*	79.44
		Persentase Penggunaan Benih Bersertifikat	%	100	100.00	100.00	100.00

**Data KSA BPS dan SIMTP

**Data Angka Sangat Sementara Tanaman Pangan dan Hortikultura

*Data Angka Sementara Perkebunan

PENUTUP

Demikian Laporan Pembangunan Pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode Agustus 2020 sampai dengan Februari 2024 disusun sebagai Memory Akhir Jabatan (MAJ) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Selamat memasuki masa Purna Bakti untuk Bapak Lecky Frederich Koli, STP, terima kasih atas pengabdian dan dedikasi dalam Pembangunan pertanian NTT, selama menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT. Semoga segala amalan dan budi baik Bapak dibalas dengan berkat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.